

PENGANTAR DIPLOMASI

SEJARAH, TEORI DAN STUDI KASUS

FRISCA ALEXANDRA
DADANG ILHAM K. MUJIONO

EDITOR
UNI W. SAGENA

PENGANTAR DIPLOMASI

Sejarah, Teori dan Studi Kasus

Penulis : Frisca Alexandra
Dadang Ilham K. Mujiono

Editor : Uni W. Sagena

ISBN : 978-623-7480-14-3
© 2019. Mulawarman University Press

Cetakan Pertama : November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Alexandra, F. dan Dadang, I.K.M. 2019. Pengantar Diplomasi :
Sejarah, Teori dan Studi Kasus. Mulawarman University
Press. Samarinda.



**Mulawarman
University PRESS**

Member of IKAPI & APPTI

Penerbit

Mulawarman University PRESS

Gedung LP2M Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id

BUKU AJAR
PENGANTAR DIPLOMASI
SEJARAH, TEORI DAN STUDI KASUS

Tim Penulis:
Frisca Alexandra
Dadang Ilham K. Mujiono

Tata Letak:
Dadang Ilham K. Mujiono

Cover:
Wirandy Saputra

Editor:
Uni W. Sagena



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Buku ajar ini dipersembahkan untuk Almamater
Tercinta Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
&
Mahasiswa Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman**

KATA PENGANTAR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman memiliki VISI yakni fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial hingga 2025. Salah satu upaya dalam mewujudkan visi tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan mahasiswa yang dimiliki oleh FISIP Unmul sehingga kelak dapat berdaya saing di tingkat ASEAN.

Adapun salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan menerbitkan buku ajar yang memiliki format berstandar UNESCO dan diadopsi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku ajar yang saudara pegang merupakan karya ilmiah yang telah dibuat oleh dua dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unmul. Terlebih buku ajar ini diterbitkan melalui lembaga penerbitan yang dimiliki oleh Universitas Mulawarman, yakni Mulawarman University Press.

Dengan adanya buku ajar ini, diharapkan mahasiswa hubungan internasional yang mengambil mata kuliah Diplomasi Teori tidak hanya dapat memahami mata kuliah tersebut dengan lebih mudah. Tetapi juga dapat membantu mahasiswa dalam berpikir kritis terkait isu-isu hubungan internasional khususnya tentang diplomasi.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi dosen lainnya untuk menambah koleksi publikasi demi kebaikan bersama, khususnya bagi FISIP Unmul.

Samarinda, 22 Agustus 2019
Dekan

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.

PRAKATA

Buku ajar ini dirancang sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa Hubungan Internasional tingkat ketiga pada program studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Secara spesifik buku ini ditujukan bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang masih awam terhadap diplomasi secara teoritis.

Banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa diplomasi hanya dapat dilakukan oleh aktor negara dan praktik diplomasi sendiri dilakukan ketika dua atau lebih pemimpin negara saling bertemu dan melakukan negosiasi. Padahal era globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia internasional. Aktor dalam hubungan internasional kini tidak hanya ada aktor negara akan tetapi juga ada aktor non negara. Begitu pula isu yang menjadi perhatian dari aktor-aktor tersebut, yang tidak hanya berfokus pada isu keamanan, ekonomi dan politik saja akan tetapi juga isu-isu seperti isu lingkungan, sosial budaya hingga kemanusiaan.

Perkembangan aktor dan perkembangan isu dalam hubungan internasional turut mempengaruhi perkembangan praktik diplomasi. Diplomasi kini tidak lagi hanya berfokus pada instrumen *hard power* akan tetapi lebih mengedepankan instrumen *soft power*.

Buku ini akan membantu mahasiswa mengenali dan menganalisa beberapa hal mendasar dalam diplomasi yang dimulai secara berurutan dari sejarah diplomasi, tahapan-tahapan dalam negosiasi, kementerian luar negeri, berbagai model dan metode dalam berdiplomasi hingga instrumen

diplomasi *soft power* seperti diplomasi publik, diplomasi budaya, gastro diplomasi, diplomasi lingkungan serta diplomasi kemanusiaan.

Penulis memahami bahwa tentunya masih terdapat kekurangan dalam buku ajar ini, baik dalam substansi maupun studi kasus yang disajikan. Sehingga penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun terhadap buku ajar ini, agar penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Samarinda, 17 Agustus 2019

Frisca Alexandra
Dadang Ilham K. Mujiono

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Halaman Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Grafik	x
Daftar Tabel	xi
Bab I	
The Changing Nature of Diplomacy	1
A. Pendahuluan	1
1. Sasaran Pembelajaran	1
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa	1
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	1
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	2
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	2
B. Penyajian Materi Bahasan	2
1. Apa itu Diplomasi	3
2. Sejarah Diplomasi	4
3. Mengapa Negara perlu Melakukan Diplomasi	13
4. Simpulan	19
C. Penutup	20
1. Soal Latihan	20
2. Umpan Balik	20
3. Daftar Pustaka	20

Bab II

The Art of Negotiation	21
A. Pendahuluan	21
1. Sasaran Pembelajaran.....	21
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa.....	21
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	21
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	22
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	22
B. Penyajian Materi Bahasan.....	22
1. Apa itu Negosiasi	23
2. Jenis Negosiasi	26
3. Sifat Negosiasi	27
4. Prinsip Negosiasi	28
5. Proses Negosiasi	31
6. Simpulan	40
C. Penutup	40
1. Soal Latihan	40
2. Umpan Balik.....	41
3. Daftar Pustaka.....	41

Bab III

Ministry of Foreign Affairs	42
A. Pendahuluan	42
1. Sasaran Pembelajaran.....	42
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa.....	42
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	42
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	43
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	43
B. Penyajian Materi Bahasan.....	43
1. Tujuan Diplomasi	44
2. Sejarah Diplomasi dan Kementerian Luar Negeri	45
3. Penempatan Diplomat dan Staf lain di luar negeri	50

4. Perbedaan Diplomat dan Konsulat Jenderal	52
5. Kekebalan Diplomatik.....	57
6. Simpulan	61
C. Penutup	62
1. Soal Latihan	62
2. Umpan Balik.....	62
3. Daftar Pustaka.....	62

Bab IV

Modes and Methods in Diplomacy

A. Pendahuluan	64
1. Sasaran Pembelajaran.....	64
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa.....	64
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya.....	64
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	65
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	65
B. Penyajian Materi Bahasan.....	65
1. Korespondensi diplomatik	66
2. Model dalam Diplomasi.....	70
3. Metode Diplomasi	81
4. Simpulan	85
C. Penutup	86
1. Soal Latihan	86
2. Umpan Balik.....	86
3. Daftar Pustaka.....	87

Bab V

Public Diplomacy, Cultural Diplomacy and Gastrodiplomacy.....

A. Pendahuluan.....	88
1. Sasaran Pembelajaran.....	88
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa.....	88

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	88
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	89
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	89
B. Penyajian Materi Bahasan.....	89
1. Public diplomacy.....	91
2. Cultural diplomacy.....	99
3. Gastrodiplomacy.....	105
4. Simpulan	109
C. Penutup	109
1. Soal Latihan	109
2. Umpan Balik.....	110
3. Daftar Pustaka.....	110

Bab VI

Environmental Diplomacy and Humanitarian

Diplomacy	112
A. Pendahuluan	112
1. Sasaran Pembelajaran.....	112
2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa.....	112
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	112
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	113
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	113
B. Penyajian Materi Bahasan.....	113
1. Environmental diplomacy	115
2. Humanitarian diplomacy	123
3. Simpulan	134
C. Penutup	135
1. Soal Latihan	135
2. Umpan Balik.....	136
3. Daftar Pustaka.....	136
Biografi Penulis	138

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Proses Negosiasi Halaman 32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Deadline	38
Tabel 3.1 Perbedaan Diplomat dan Konsulat Jenderal	52

BAB I

THE CHANGING NATURE OF DIPLOMACY

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan hal-hal dasar terkait diplomasi, dimulai dari definisi, tujuan, instrumen dan juga tugas dari diplomasi serta mampu memahami sejarah dan perkembangan diplomasi serta posisi diplomasi dalam spektrum perang dan damai.

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari sejarah dan perkembangan diplomasi

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang definisi, tugas serta fungsi dari diplomasi, dan juga sejarah dan perubahan-perubahan dalam perkembangan diplomasi sejak era Mesir kuno hingga era modern saat ini sehingga akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang seni bernegosiasi.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu memahami definisi, tugas dan fungsi diplomasi serta mampu menjabarkan sejarah serta perkembangan diplomasi.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Berbicara tentang hubungan internasional atau hubungan yang melibatkan aktor-aktor negara dalam dunia internasional maka diplomasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Diplomasi dan hubungan antar negara tidak dapat dipisahkan layaknya mahasiswa Hubungan Internasional dan anggapan ingin menjadi seorang diplomat. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, tidak sedikit yang memiliki cita-cita menjadi seorang diplomat sehingga memilih kuliah dalam jurusan Hubungan Internasional.

Padahal mahasiswa Hubungan Internasional, tidak hanya dapat bekerja sebagai diplomat tetapi juga dapat menerapkan ilmunya dan bekerja pada perusahaan-perusahaan asing maupun organisasi non pemerintah. Namun, sebagai mahasiswa Hubungan Internasional memiliki pengetahuan dasar tentang diplomasi tentu menjadi amat sangat penting,

Mengapa ? Karena diplomasi dan hubungan antar negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga sebelum mempelajari lebih dalam tentang Hubungan Internasional, diplomasi adalah pengetahuan dasar dan wajib bagi seluruh mahasiswa Hubungan Internasional.

1. Apa itu Diplomasi ?

Mari kita mulai pembahasan bab ini dengan mengenal apa yang dimaksud dengan diplomasi secara harfiah ? Diplomasi kerap kali diartikan secara sederhana sebagai hubungan antar negara. Namun secara harfiah menurut defenisi *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, **diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara**. Sementara menurut *Oxford English Dictionary*, **diplomasi adalah sebuah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar ataupun diplomat¹**.

Pendapat yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Geoffrey McDermott yang mengatakan bahwa **diplomasi adalah pertimbangan dalam hubungan internasional**. Sementara Ellis Briggs mengatakan bahwa **diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan *official* dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan²**. Berdasarkan pengertian menurut kamus dan juga para ahli dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah manajemen hubungan internasional antar negara-negara didunia yang melibatkan seni berunding atau negosiasi dan dilakukan oleh

¹ S.L, Roy, 1995, *Diplomasi*, Jakarta Utara, PT. Raja Grafindo Persada.

² *ibid*

perwakilan dari pemerintahan suatu negara yang kemudian disebut sebagai duta besar ataupun diplomat.

Meskipun dalam perkembangannya, praktik diplomasi tidak selalu harus melibatkan proses negosiasi ataupun perundingan dan praktik diplomasi juga tidak selalu harus dilakukan oleh duta besar atau diplomat. Kita akan membahas lebih detail tentang aktor-aktor serta gaya dalam berdiplomasi secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya.

2. Sejarah Diplomasi

Setelah mahasiswa memahami pengertian diplomasi secara harfiah dan berdasarkan pendapat para ahli, mahasiswa juga perlu memahami sejarah lahirnya diplomasi dan bagaimana diplomasi berkembang dari masa ke masa hingga menjadi suatu seni yang tidak dapat dilepaskan dalam hubungan antar negara seperti yang kita kenal saat ini.

Kapan tepatnya masyarakat internasional mengenal praktik diplomasi dan menerapkannya dalam hubungan antar negara ? Apakah diplomasi tercetus pasca berakhirnya Perang Dunia I, ketika negara-negara memutuskan untuk mengakhiri perang dan membentuk suatu organisasi internasional guna mencegah pecah perang serupa dikemudian hari, yang dikenal sebagai Liga Bangsa-Bangsa?

Berdasarkan sejarahnya, diplomasi sudah dilakukan sejak zaman peradaban kuno, yaitu pada masa peradaban Mesopotamia yang diwujudkan melalui perjanjian antar suku serta penggunaan bahasa kedua suku yang menjadi bahasa

diplomasi pertama di Timur Tengah, yakni Babilonia dan Akkadia.

Dewasa ini, negara-negara di dunia menyepakati Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sekaligus bahasa diplomasi, meskipun dalam pelaksanaan praktik diplomasi, tidak jarang para pemimpin negara yang menggunakan bahasa negara mereka masing-masing hasilnya adalah keberadaan penerjemah dalam pertemuan bilateral maupun multilateral diantara negara menjadi hal yang lumrah dan wajib.

Mengapa banyak negara yang menggunakan bahasa nasionalnya dalam pertemuan bilateral maupun multilateral dengan negara lain sementara Bahasa Inggris telah disepakati sebagai bahasa internasional sekaligus bahasa diplomasi ? Hal ini tidak terlepas dari *bargaining position* atau posisi tawar dari suatu negara. Penggunaan bahasa nasional yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara dalam pertemuan internasional dengan negara lain, bukan berarti menunjukkan bahwa sang pemimpin negara tidak fasih menggunakan Bahasa Inggris tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa sang pemimpin negara tersebut ingin menunjukkan posisi tawar serta kekuatan dari negaranya.

Kekuatan suatu negara memang tidak melulu hanya dapat diukur melalui kekuatan militer yang dimiliki negara tersebut atau letak geografis negara tersebut tetapi juga hal-hal kecil seperti penggunaan bahasa dalam pertemuan internasional yang sedikit banyak dapat menunjukkan kekuatan suatu negara dan meningkatkan posisi tawar dari negara tersebut.

Kembali pada peradaban Mesopotamian, selain terciptanya perjanjian antar suku serta penggunaan bahasa diplomatik pertama, peradaban Mesopotamia juga telah melahirkan kegiatan diplomasi untuk pertama kalinya yakni antara New Kingdom dan Near East. Diplomasi di era tersebut dipelopori oleh Raja Mesir Kuno yang bernama Pharaoh Ramesses II yang menjalin hubungan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hittite. Alasan yang mendasari terjalinnya hubungan antara Raja Pharaoh Ramesses II dan Raja Hittite adalah untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat berujung pada perpecahan. Para arkeolog berhasil menemukan bukti terkait dengan teknik diplomasi di era Mesopotamia yakni sebuah dokumen yang disebut dengan “Tell el Amarna” atau Perjanjian Amarna. Perjanjian ini diyakini sebagai perjanjian tertua yang pernah ditemukan sepanjang sejarah³.

Hubungan baik antara dua kerajaan yang berbeda guna menghindari konflik yang dipelopori oleh Raja-raja Mesir Kuno, kemudian berkembang hingga ke tanah Eropa. Raja-raja di Eropa juga menjalin hubungan baik diantara kerajaan mereka melalui perjodohan dan pernikahan hingga hubungan dagang guna menghindari konflik.

Setelah era Mesopotamia, era Yunani kuno juga turut memberikan kontribusi dalam sejarah perkembangan diplomasi. Sistem negara-kota yang dianut pada masa Yunani kuno menuntut perwakilan antar masing-masing negara-kota agar selalu terhubung dengan menyampaikan pesan hingga melakukan proses negosiasi. Hal inilah yang

³ Shuhej, Kurizaki, 2011, A Natural History of Diplomacy, Tersedia dalam <http://people.tamu.edu/~kurizaki/b3.pdf> diakses pada 12 Juni 2019

membuat pada era Yunani kuno, pertama kali tercetus utusan diplomatik sebagai perwakilan dari masing-masing negara-kota.

Pada mulanya, utusan diplomatik ini hanya sebagai perwakilan dari negara-kota dan menjadi penyampai pesan dan melakukan proses negosiasi didalam internal suatu negara saja. Hal ini kemudian mengalami perkembangan hingga seperti yang kita kenal saat ini, yaitu seorang utusan diplomatik menjadi perwakilan suatu negara kepada negara lain dan memiliki tugas lebih dari sekedar penyampai pesan tetapi sebagai penjaga hubungan baik diantara negara.

Utusan diplomatik pada era Yunani Kuno dikenal dengan sebutan “Heralds” yang berarti orang suci. Masyarakat Yunani memilih ahli pidato terbaik sebagai utusan diplomatik mereka yang akan dikirim untuk melakukan perundingan ataupun negosiasi secara lisan⁴. Dalam peradaban Yunani kuno, proses diplomasi lebih sering dilakukan dalam bentuk *public oratory* dibandingkan dengan negosiasi dalam bentuk tulisan dokumen.

Hal ini juga tentu saja akan mengalami perkembangan karena diplomasi dewasa ini tidak hanya dapat dilakukan melalui perundingan secara tatap muka melainkan juga dapat dilakukan melalui surat hingga penggunaan media komunikasi lainnya.

Masyarakat Yunani yang memang kental dengan mitologinya meyakini bahwa para Heralds dilindungi oleh para dewa. Berdasarkan mitologi Yunani, mereka percaya bahwa dewa bangsa Olympia yakni Hermes, terlibat dalam

⁴ ibid

kegiatan-kegiatan diplomatik. Hermes ditugaskan oleh Zeus sebagai raja para dewa untuk melaksanakan misi-misi diplomatik. Berdasarkan mitologi Yunani, Hermes adalah dewa pembawa pesan. Sebagai dewa pembawa pesan, Hermes bertugas mengantarkan pesan dari para dewa di Olimpus kepada masyarakat Yunani

Tidak berhenti sampai disitu, bangsa Yunani kemudian menyebarkan praktik-praktik diplomasinya kepada bangsa Romawi. Pada mulanya, bangsa Romawi membuat sebuah perjanjian atas dasar azas timbal balik dan koalisi antara *partner* yang sejajar. Namun setelah Romawi menjadi bangsa yang kuat, mereka mulai melakukan proses diplomasi satu arah dan menghilangkan prinsip timbal balik antar negara⁵. Dalam proses negosiasi dewasa ini, hal ini dikenal sebagai *win-lose solution* yaitu ketika satu pihak yang memiliki *power* serta *bargaining position* yang lebih besar mampu menekan pihak lawan yang lebih lemah dan mampu menghasilkan perjanjian yang lebih menguntungkan untuk mereka sementara idealnya suatu perjanjian dari hasil negosiasi diraih dengan hasil *win-win solution* atau perjanjian atas dasar azas timbal balik, semua pihak mendapatkan keuntungan yang serupa dan tidak ada satu pihak yang lebih diuntungkan dibanding yang lain.

Berdasarkan sejarah, peradaban pertama yang melahirkan konsep pengiriman duta besar adalah kekaisaran Romawi. Konsep pengiriman duta besar ini merupakan perkembangan dari utusan diplomatik pada era Yunani Kuno. Bangsa Romawi menyebut utusannya sebagai “Legati”, Selain itu, bangsa Romawi juga memperkenalkan

⁵ ibid

istilah “Nuntius”, yaitu pembawa pesan yang dikirim ke luar daerah yang kemudian kembali setelah misi terselesaikan.

Dewasa ini, profesi sebagai seorang diplomat merupakan profesi yang dianggap ‘berkelas’ bagi sebagian kalangan bahkan tidak sedikit generasi muda yang bercita-cita bisa menjadi seorang diplomat. Meskipun utusan diplomatik telah diperkenalkan pada era Yunani Kuno dan kemudian berkembang pada era Bangsa Romawi, baru pada Abad ke-15 hingga ke-16 atau yang lebih dikenal sebagai sistem kota Italia yaitu ketika diplomat secara resmi dianggap sebagai suatu profesi.

Para diplomat kala itu memegang peranan penting untuk memelihara hubungan diantara para penguasa dan untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Penempatan misi permanen seorang diplomat pertama kali juga dilakukan pada abad ini tepatnya pada tahun 1455, dengan menempatkan Fransisco Sforza, Duke of Milan di Genoa.

Dengan ditematkannya perwakilan diplomatik secara permanen, menjadi titik awal adanya kesadaran mengenai diperlukannya dasar yang kuat bagi pelayanan diplomatik. Para diplomat yang berada di negara lain diminta untuk melakukan tugas, termasuk didalamnya adalah pengumpulan informasi serta mengamankan kepentingan militer dan ekonomi negaranya. Pada masa ini, diplomasi yang dilakukan memberikan kontribusi besar bagi praktik diplomasi yang dijalankan pada saat ini seperti sistem pengarsipan yang tertata dengan rapih dan terorganisir serta reputasi baik sehubungan dengan kehalusan budi bahasa dan kecakapan serta aktualitas dalam pengumpulan informasi.

Memasuki abad ke-17, pengiriman dan penempatan diplomat secara permanen merupakan praktek yang umum diantara negara-negara didunia. Terlebih setelah ditandatanganinya perjanjian damai Westphalia tahun 1648 yang menjadi titik kristalisasi dan peresmian sistem negara. Pada abad ini juga terdapat beberapa faktor yang kemudian mendorong pelaksanaan praktek-praktek diplomasi modern. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hugo Grotius dengan tulisannya terkait Hukum Perang dan Damai, tulisannya ini membantu perkembangan hukum internasional dan memainkan peranan penting dalam evolusi diplomasi.

Selain itu, Kardinal Richelieu, seorang negarawan Perancis, turut memberikan sumbangsih pada perkembangan praktek diplomasi, pada periode ini, bangsa Perancis memberikan perhatian besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta besar. Instruksi ini berisikan tentang garis besar kebijakan yang harus dicapai oleh duta besar, instruksi ini juga sering menyertakan surat kepercayaan (*Letters of Credence*) yang disertai pula dengan surat perkenalan atau surat tugas dari duta besar kepada para pejabat negara yang bersangkutan ditempatkan. Kepopuleran metode diplomasi Perancis menjadikan bahasa Perancis sebagai *lingua franca* diplomasi kala itu⁶.

Abad ke-18 dapat dikatakan sebagai periode keemasan praktek diplomasi. Dalam abad ini terdapat tiga kecenderungan dalam evolusi diplomasi. Pertama, adanya pengakuan umum yang diberikan kepada sebuah sistem yang secara umum menerima hukum internasional. Kedua, pengaruh kelas politik militer yang berusaha untuk

⁶ S.L, Roy, 1995, *Diplomasi*, Jakarta Utara, PT. Raja Grafindo Persada.

melanggengkan sistem feodal, kelompok ini kemudian memainkan peranan besar dalam diplomasi. Ketiga, muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Tipe diplomasi seperti ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi borjuis, salah satunya seperti yang dipraktekkan oleh Inggris.

Inggris pada masa itu merupakan sebuah negara yang berada pada masa jayanya. Mereka menggunakan praktek diplomasi dengan menekankan kepada *profit-politics* dibandingkan *power-politics*, artinya diplomasi yang dilakukan oleh Inggris kala itu lebih kepada mengejar keuntungan secara komersil dibandingkan untuk mengejar kekuatan atau *power*.

Memasuki abad ke-19, praktek diplomasi menggunakan metode-metode baru guna menghadapi persoalan-persoalan baru. Horland Nicholson dalam bukunya berjudul "Diplomacy" mengatakan bahwa terdapat tiga perkembangan yang mempengaruhi praktek diplomasi pada abad ke-19 yakni perkembangan bangsa-bangsa, bertambahnya apresiasi tentang pentingnya *public opinion* serta perkembangan cepat dalam bidang komunikasi. Sementara memasuki abad ke-20, terdapat dua hal yang cukup signifikan dalam perkembangan praktek diplomasi yakni lebih terbuka kepada publik dan munculnya organisasi internasional sebagai salah satu aktor serta wadah dalam melakukan diplomasi.

Keterbukaan diplomasi kepada publik terkait bagaimana akses yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan proses serta hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Sementara munculnya organisasi internasional sebagai aktor serta wadah dalam melakukan

diplomasi ditandai dengan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB pada saat itu difungsikan sebagai wadah untuk menyelesaikan persengketaan internasional serta menjadi instrumen dalam menjaga kerangka keamanan kolektif. Pada titik ini, negara tetap menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional namun yang kemudian menjadi perhatian adalah munculnya aktor lain dalam hubungan internasional yang juga melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi seiring dengan interaksi mereka dengan negara.

Selain itu, terdapat perluasan cakupan isu dari kegiatan diplomasi. Diplomasi konvensional hanya berfokus pada isu keamanan kemudian berkembang ke arah ekonomi dan kesejahteraan. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia internasional, beberapa isu baru seperti isu lingkungan hingga isu hak asasi manusia turut menjadi perhatian dan bahasan dalam praktek-praktek diplomasi

Isu-isu baru ini kemudian dikenal dengan isu "*low politics*" untuk membedakan dengan isu "*high politics*" yang diasosiasikan dengan agenda diplomasi tradisional. Isu-isu baru ini tidak hanya menjadi perhatian oleh aktor negara tetapi juga oleh aktor-aktor non negara, dan memasuki abad ke-21, isu-isu *low politics* semakin mendominasi dalam praktek-praktek diplomasi modern. Perkembangan aktor dan isu dalam hubungan internasional, turut mempengaruhi praktik diplomasi yang juga mengalami perkembangan dan mendapatkan penamaan sesuai dengan spesifikasinya.

3. Mengapa Negara Perlu Melakukan Diplomasi ?

Diawal kemunculannya, praktik diplomasi dilakukan guna menjaga hubungan baik antara negara dan menghindari konflik. Namun seiring dengan berkembangnya isu, aktor, hingga metode diplomasi, alasan negara perlu melakukan praktik diplomasi pun turut berkembang.

Setiap negara didunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Guna memenuhi kepentingan nasional tersebut, negara tidak mungkin mampu memenuhinya sendiri sehingga negara membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Kepentingan nasional ini kemudian diformulasikan melalui politik luar negeri dan juga kebijakan luar negeri dan disinilah diplomasi memainkan peranannya, yakni sebagai medium bagi negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Selain untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, diplomasi juga diperlukan guna menjaga perdamaian dunia. Secara sederhana, terdapat empat tujuan diplomasi yakni⁷ :

1. *Acquisition* : Membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik)
2. *Preservation* : Menjaga hubungan diplomatik
3. *Augmentation* : Memperluas hubungan diplomatik
4. *Proper Distribution* : Harmoni perdamaian

Guna memudahkan pemahaman mahasiswa, penulis akan memberikan ilustrasi contoh. Indonesia adalah negara yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun hal ini tidak serta merta menjadikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya secara

⁷ ibid

mandiri. Tingginya konsumsi daging sapi oleh masyarakat Indonesia, membuat pemerintah Indonesia memerlukan kerjasama impor daging sapi dengan Australia, guna mempertahankan pasokan daging sapi di Indonesia.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam namun ada beberapa kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan negara sahabat.

Sebelum melakukan kerjasama dengan negara sahabat, kedua negara terlebih dahulu sudah harus memiliki hubungan diplomatik (*acquisition*). Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sendiri telah terjalin sejak tahun 1949. Terjalannya hubungan diplomatik diantara kedua negara ini menjadi bentuk komitmen dari kedua negara untuk saling bekerjasama guna mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Setelah terbentuknya hubungan diplomatik, kedua negara tentunya harus menjaga hubungan tersebut. Meskipun Indonesia dan Australia tidak jarang terlibat dalam friksi dan perselisihan namun kedua negara selalu menemukan jalan tengah atas permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai contoh adalah ketika hubungan Indonesia dan Australia memanas saat Australia diketahui melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau ketika kasus hukuman mati warga negara Australia yang dikenal sebagai *Bali Nine*.

Meskipun sempat terjadi ketegangan diantara kedua negara namun Indonesia dan Australia mampu menyelesaikan friksi tersebut dengan jalan damai dan tidak sampai merusak hubungan kerjasama keduanya. Ilustrasi hubungan Indonesia dan Australia ini juga bisa dianalogikan seperti hubungan pertemanan.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Itulah sebabnya, penting bagi seorang manusia untuk menjalin ataupun memiliki hubungan dengan manusia lain. Setelah hubungan baik antar manusia terjalin, manusia juga perlu menjaga hubungan tersebut, agar tidak terjadi konflik yang merugikan kedua belah pihak. Manusia juga memiliki hak untuk memperluas hubungan pertemannya dengan manusia lainnya diluar hubungan pertemanan yang sudah yang ia miliki saat ini.

Hal ini serupa dengan negara, meskipun Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan Australia, namun Indonesia juga memerlukan hubungan baik dengan negara-negara lainnya. Negara perlu membangun, menjaga dan memperluas hubungan diplomatiknya dengan negara lain guna tercapainya kepentingan nasional yang dicita-citakan selain itu dengan terciptanya hubungan diplomatik yang harmonis antar negara-negara didunia maka harmonisasi perdamaian dunia akan dapat tercapai.

Adapun faktor pendukung dalam terjalinnya hubungan diplomasi yang baik antara lain :

1. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan

2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik.
4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan dalam hukum diplomatik, hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Mengutip argumen dari kelompok liberalis yang mengatakan bahwa, perdamaian dunia akan dapat dicapai apabila negara-negara didunia melakukan kerjasama. Hal ini semakin menegaskan pentingnya peran diplomasi dalam terwujudnya perdamaian dunia. Melalui praktek diplomasi, maka negara-negara didunia tidak hanya dapat mencapai kepentingan nasionalnya tetapi juga dapat mewujudkan perdamaian dunia.

Sehingga tidak mengherankan apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa gagalnya diplomasi yang dijalankan oleh suatu negara akan mengarah pada terjadinya perang. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perang terjadi bukan karena gagalnya diplomasi karena perang sesungguhnya adalah bentuk lain dari praktek diplomasi. Instrumen yang dapat digunakan dalam menjalankan praktek diplomasi bukan hanya negosiasi, kerjasama ataupun konsesi tetapi juga penggunaan senjata secara terbuka atau perang.

Sampai disini, kita memiliki dua pendapat yang berbeda dalam memandang hubungan antara perang dan diplomasi. Pendapat pertama, mengatakan bahwa perang adalah produk dari kegagalan diplomasi sementara pendapat kedua, mengatakan bahwa perang itu sendiri adalah instrumen diplomasi. Meskipun kedua pendapat ini berbeda namun jika dipandang secara obyektif, kedua pendapat ini sama-sama masuk akal.

Sebelum terjadinya perang, negara terlebih dahulu berada dalam fase konflik. Didalam fase konflik, biasanya hanya terjadi ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik, secara perlahan ketegangan ini akan terus tereskalasi dan jika selama proses eskalasi konflik, tidak dilakukan diplomasi atau proses diplomasinya gagal, maka yang terjadi selanjutnya adalah penggunaan kekuatan secara terbuka atau perang. Sehingga pendapat pertama yang mengatakan bahwa perang adalah produk dari gagalnya diplomasi adalah benar.

Selanjutnya, praktek diplomasi diterapkan guna mencapai keuntungan bagi semua pihak yang menjalankannya atau lebih dikenal dengan istilah *win-win solution*. Namun sesungguhnya dalam praktek diplomasi, hasil akhir yang dicapai tidak selalu *win-win solution*, terkadang negara bisa mendapatkan hasil akhir *win-lose solution* yakni hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan sementara pihak lain merugi ataupun *lose-lose solution* yaitu tidak ada satu pihak pun yang mendapatkan keuntungan. Hasil akhir *win-lose solution* ataupun *lose-lose solution* hanya dapat dicapai ketika negara berperang. Ketika negara berperang hanya akan ada satu pihak yang menang dan pihak lainnya kalah atau keduanya sama-sama kalah dan merugi.

Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa perang adalah instrumen diplomasi juga benar namun yang perlu ditambahkan adalah perang memang merupakan instrumen diplomasi namun perang tidak akan memberikan negara hasil akhir dimana kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan atau *win-win solution*. Jika negara ingin mencapai *win-win solution*, maka instrumen yang harus digunakan dalam praktek diplomasi adalah negosiasi, kerjasama dan juga konsesi.

Menurut Hans J. Morgenthau diplomasi memiliki empat tugas utama, yakni⁸ :

1. Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Maksudnya adalah diplomasi yang dijalankan suatu negara harus memiliki sasaran capaian, apakah diplomasi tersebut dijalankan guna mencapai kerjasama ekonomi, politik ataupun militer sehingga para aktor yang menjalankan praktek diplomasi dapat menyusun strategi guna mencapai sasaran tersebut.
2. Diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain. Maksudnya adalah para diplomat dan juga duta besar, juga harus mengetahui *bargaining position* dari negara lain, hal ini masih berkaitan dengan strategi yang akan dijalankan guna mencapai kepentingan nasional negara.

⁸ ibid

3. Diplomasi harus menentukan dalam hal apa perbedaan-perbedaan yang ada pada tujuan-tujuan negara lain dapat cocok dengan tujuan negara sendiri. Hal ini menjadi penting guna mencapai *win-win solution* sebagai hasil akhir dari proses diplomasi itu sendiri.
4. Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas. Penggunaan cara-cara yang pantas dalam diplomasi tidak hanya akan memberikan dampak bagi hubungan kedua negara tetapi juga bagi harmonisasi perdamaian dunia.

Simpulan

Diplomasi adalah sebuah seni berunding yang menentukan manajemen hubungan internasional antar negara-negara didunia. Meskipun dewasa ini, aktor dalam hubungan internasional tidak hanya ada aktor negara tetapi juga ada aktor non negara namun negara tetap memainkan peran dominan dalam hubungan internasional pun begitu pula dalam praktek diplomasi. Negara memerlukan diplomasi tidak hanya guna mencapai kepentingan nasionalnya tetapi juga agar terciptanya harmonisasi perdamaian dunia. Agar harmonisasi perdamaian dunia dapat tercapai, maka diplomasi haruslah dilakukan dengan cara-cara yang pantas seperti negosiasi dan juga kerjasama sehingga setiap negara yang melaksanakan praktek diplomasi dapat meraih keuntungan atau *win-win solution*.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Berdasarkan definisi menurut kamus besar dan juga para ahli, jabarkan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, apa yang dimaksud dengan diplomasi ?
- 1.2 Berdasarkan perkembangan sejarah diplomasi, menurut Anda, pada periode manakah yang paling banyak memberikan sumbangsih pengaruh bagi perkembangan diplomasi modern saat ini ?
- 1.3 Bagaimana Anda memandang posisi diplomasi dalam spektrum perang dan damai ?

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait diplomasi dan perkembangan sejarahnya. Fasilitator akan memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Utara.

Kurizaki, Shuhei. A Natural History of Diplomacy. 2011. Tersedia dalam <http://people.tamu.edu/~kurizaki/b3.pdf>

BAB II

THE ART OF NEGOTIATION

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan hal-hal dasar terkait negosiasi, dimulai dari definisi, variabel yang mempengaruhi hingga proses dalam bernegosiasi

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari definisi, variabel yang mempengaruhi hingga proses negosiasi.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang definisi negosiasi, klasifikasi negosiasi berdasarkan tujuan, sifat dan juga obyektifitasnya, variabel yang mempengaruhi negosiasi serta proses dalam bernegosiasi sehingga akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang kementerian luar negeri sebagai aktor yang kerap menjalankan praktik negosiasi.

4. Manfaat Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu mengenal definisi negosiasi, memetakan klasifikasi negosiasi berdasarkan tujuan, sifat dan juga obyektifitasnya, menganalisa variabel yang mempengaruhi negosiasi serta mengetahui proses dalam bernegosiasi.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Setelah dalam bab sebelumnya, mahasiswa telah mengetahui tentang definisi diplomasi, sejarah diplomasi hingga mengapa negara perlu melakukan diplomasi, maka pada bab ini, mahasiswa akan diajak untuk mengetahui tentang salah satu gaya diplomasi tertua yakni negosiasi.

Dalam praktik diplomasi, negosiasi adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun seiring dengan perkembangan isu serta aktor dalam hubungan internasional yang kemudian turut memberikan pengaruh terhadap gaya dan metode dalam berdiplomasi namun negosiasi tetap memegang peranan penting dalam praktik berdiplomasi.

Ketika suatu negara bernegosiasi dengan negara lainnya, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti posisi tawar dari negara hingga *power* dari negara tersebut. aspek-aspek ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap hasil dari negosiasi yang dilakukan. Namun sebelum lebih dalam membahas tentang proses negosiasi dan apa saja aspek-aspek yang dapat mempengaruhi hasil suatu negosiasi, mahasiswa terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari negosiasi itu sendiri.

1. Apa itu Negosiasi ?

Negosiasi adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari diplomasi. Berbicara mengenai diplomasi, erat kaitannya dengan negosiasi, bahkan dapat dikatakan bahwa negosiasi adalah salah satu bentuk diplomasi yang paling populer sehingga penting kiranya untuk memahami pemahaman dasar terkait negosiasi.

Secara definisi, **negosiasi dapat berarti sebuah metode penyelesaian sengketa yang paling dasar, sederhana dan tidak formal.** Sementara Gary Goodpaster dalam bukunya mendefinisikan **negosiasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain⁹.**

Fisher dan Ury mendefinisikan **negosiasi sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga maupun dengan melibatkan**

⁹ Goodpaster, Gary, 1993, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project.

pihak ketiga sebagai penengah, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediator) maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (ajudikator)¹⁰.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli terkait definisi negosiasi dapat disimpulkan bahwa negosiasi tidak hanya dapat diterapkan agar terjalinnya kerjasama diantara negara tetapi juga dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berkonflik, yang dapat melibatkan pihak ketiga baik sebagai mediator maupun sebagai adjudikator.

Dalam praktik diplomasi, negosiasi memiliki banyak arti dan salah satunya dapat diartikan sebagai proses diskusi antara beberapa pihak dengan tujuan preventif, menyelesaikan masalah, maupun resolusi konflik. Negosiasi menjadi komponen penting dalam proses diplomasi karena negosiasiilah yang menjadi jembatan hubungan setiap negara baik hubungan kerjasama maupun konflik.

Setiap negara didunia membutuhkan hubungan baik negara lain, hubungan antar negara ini menjadi penting guna tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Sehingga negara-negara didunia kerap kali melakukan kerjasama dengan negara lainnya, kerjasama ini dapat berfokus pada bidang pertahanan keamanan, politik, sosial hingga ekonomi. Guna tercapainya kerjasama diantara dua negara atau lebih, negara-negara akan melakukan proses negosiasi. Proses negosiasi ini dilakukan untuk mendiskusikan apa yang

¹⁰ Fisher, Roger, William Ury with Bruce Patton, 1991, *Getting to Yes : Negotiating an Agreement without Giving in*, Sydney, Century Business.

menjadi kepentingan nasional dari masing-masing negara hingga bagaimana negara-negara tersebut ingin kerjasama diantara mereka dijalankan.

Negosiasi sebagai bagian dari diplomasi juga dilakukan demi mencegah maupun meredam konflik melalui jalan damai. Apabila terjalin hubungan kerjasama yang baik diantara negara-negara didunia, maka konflik akan dapat dihindari. Sementara apabila konflik sudah terlanjur terjadi diantara negara-negara maka yang harus dilakukan guna meredam friksi adalah dengan mengadakan pertemuan diantara negara-negara yang berkonflik agar dapat duduk bersama dan membicarakan serta mencari solusi dari perselisihan mereka.

Proses negosiasi diantara negara yang berkonflik sedikit lebih rumit dibandingkan negosiasi yang membahas hubungan kerjasama. Kerumitan inilah yang menyebabkan dalam proses negosiasi guna menyelesaikan konflik terkadang dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah atau dapat digambarkan secara sederhana sebagai wasit. Pihak ketiga ini dapat berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan akhir dan dapat pula berperan sebagai adjudikator, pihak ketiga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir terkait suatu sengketa atau konflik.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat **tiga tujuan dari negosiasi yakni : terciptanya hubungan kerjasama, menyelesaikan konflik dan mencegah konflik.** Tujuan negosiasi ini masih sejalan dengan definisi dari negosiasi itu sendiri.

G.R. Berridge mengemukakan bahwa dalam hubungan internasional, utamanya dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik, negosiasi lebih sering digunakan daripada penyelesaian masalah melalui jalan paksa, propaganda, hingga permasalahan hukum yang akhirnya berujung juga pada negosiasi. Orientasi negosiasi lebih kepada keuntungan dua pihak (*win win solution*) agar konflik terselesaikan secara damai.

Berbicara mengenai orientasi negosiasi, *win win solution* adalah orientasi negosiasi yang paling familiar didengar, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa orientasi inilah yang paling ideal untuk dicapai karena memberikan keuntungan bagi semua pihak. Namun seperti yang telah disampaikan diawal, bahwa kita tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi hasil akhir atau orientasi dari negosiasi itu sendiri seperti *power* dan juga *bargaining position* atau posisi tawar.

2. Jenis Negosiasi

Menurut Lewichi terdapat tiga obyektifitas negosiasi berdasarkan orientasinya, yang pertama adalah orientasi negosiasi dengan mengedepankan keuntungan kedua belah pihak atau *win win solution* yang disebut sebagai **negosiasi integratif**, yaitu negosiasi yang dilakukan guna mencapai kepentingan nasional suatu negara dengan menyatukan kepentingan yang berbeda dengan negara lain dan memaksimalan upaya bersama.

Selain integratif, terdapat pula **negosiasi distributif**, didalamnya terjadi persaingan sengit untuk mendapatkan keuntungan sepihak, sehingga orientasinya adalah *win lose*

solution. Dalam negosiasi distributif, negara benar-benar memanfaatkan posisi tawarnya guna meraih keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya. Negosiasi ini bersifat *zero sum game* yaitu terdapat salah satu pihak yang kalah dan pihak lainnya yang menang.

Zero sum game adalah salah satu teori dasar dalam hubungan internasional yang menggambarkan hubungan negara yaitu ketika keuntungan atau keunggulan yang didapatkan atau dimiliki suatu negara berarti kerugian atau kelemahan yang dirasakan oleh negara lainnya.

Terakhir adalah **negosiasi destruktif** yaitu orientasi dari negosiasi ini cenderung tidak menguntungkan, sebab pihak yang memenangkan negosiasi tetap harus menanggung konsekuensi atau kerugian meski tidak banyak sehingga orientasi dari negosiasi ini adalah *lose lose solution*¹¹.

3. Sifat Negosiasi

Selain berdasarkan orientasinya, negosiasi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Terdapat tiga sifat negosiasi yakni:

1. ***Hard negotiation***. Sifat ini biasanya identik dengan konfrontasi, yaitu masing-masing pihak beranggapan bahwa mereka saling bermusuhan. Pada sifat ini diplomasi cenderung agresif dan kompetitif sebab masing-masing berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. *Bargaining Position* lebih berperan dibandingkan *National Interest*. Artinya, tiap negara

¹¹ Berridge, G.R, 2005, *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 29

yang terlibat dalam negosiasi akan menggunakan posisi tawarnya pun juga *power* yang mereka miliki untuk menekan negara lawannya guna mencapai keuntungan yang lebih besar dalam proses negosiasi.

2. ***Soft negotiation.*** Diplomasi dengan sifat ini lebih menekankan pengertian dan hubungan baik. Masing-masing pihak saling toleransi dan tidak menjatuhkan, sehingga negosiasi berjalan dengan lebih mudah dan lebih besar pula kemungkinan negosiasi berakhir dengan keuntungan kedua belah pihak.
3. ***Principled negotiation.*** Negosiasi ini berdasarkan prinsipnya terlihat lebih jelas karena terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang dapat direalisasikan untuk mencapai tujuan dari negosiasi itu sendiri. *National interest* lebih berperan dibandingkan *bargaining position*. Sifat negosiasi ini merupakan kebalikan dari *hard negotiation*, dimana dalam *principled negotiation*, negara-negara lebih mengutamakan pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi sehingga posisi tawar maupun *power* dari suatu negara akan dikesampingkan. *Principled negotiation* biasanya lebih banyak digunakan dalam forum negosiasi multilateral seperti KTT ASEAN¹².

4. Prinsip Negosiasi

Negosiasi sebagai bentuk praktik diplomasi yang paling populer dan kerap kali digunakan oleh negara-negara didunia, memiliki prinsip-prinsip guna mengatur jalannya

¹² Fisher, Roger, William Ury with Bruce Patton, 1991, *Getting to Yes : Negotiating an Agreement without Giving in*, Sydney, Century Business.

proses negosiasi itu sendiri. Prinsip-prinsip ini dirancang agar tiap-tiap negara yang terlibat dalam proses negosiasi dapat mencapai kepentingan nasionalnya dan meraih keuntungan bersama.

Ada pun **prinsip negosiasi yang pertama** adalah pemisahan antara isu relasi dengan isu-isu yang substansial. Artinya, dalam proses negosiasi biasanya negara membawa suatu agenda penting yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut sehingga tiap-tiap negara yang terlibat dalam proses negosiasi baik bilateral maupun multilateral dapat berfokus pada agenda penting tersebut terlepas dari isu-isu mikro yang mungkin juga menyelimuti hubungan antar negara. Hal ini dimaksudkan agar negosiasi tidak berjalan sia-sia dan dapat menghasilkan suatu kesepakatan diantara negara yang terlibat.

Prinsip kedua yakni meletakkan titik fokus negosiasi pada kepentingan, bukan posisi. Meskipun dalam salah satu sifat negosiasi, disebutkan bahwa *hard negotiation* lebih mengutamakan posisi dibandingkan kepentingan namun dalam prinsipnya, negosiasi yang baik hendaklah mengutamakan kepentingan bukan posisi tawar, karena apabila semua proses negosiasi lebih mengedepankan posisi tawar dibanding kepentingan maka negosiasi hanya akan memberikan keuntungan bagi negara dengan posisi tawar yang lebih besar dibanding negara dengan posisi tawar yang lebih kecil.

Prinsip ketiga, negosiasi yang dilakukan adalah dengan misi mencari solusi baru atas permasalahan yang terjadi, namun harus adil terhadap kedua pihak sehingga keduanya sama-sama diuntungkan. Proses negosiasi

terkadang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang sehingga kerap kali negara perlu melakukan proses ini berulang kali demi tercapainya hasil yang dapat memberi keuntungan bagi semua pihak.

Prinsip ketiga ini mengingatkan kita kepada proses negosiasi penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Ketika itu proses negosiasi penyelesaian sengketa ini berjalan alot dan panjang yang dimulai sejak Perjanjian Oslo 1993 namun sampai saat ini, negara-negara didunia tetap berkomitmen untuk menemukan solusi baru guna menyelesaikan konflik Israel dan Palestina sesuai dengan prinsip ketiga dalam negosiasi.

Prinsip keempat adalah tuntutan untuk mengambil keputusan yang obyektif dan adil. Prinsip ini lebih banyak digunakan dan diterapkan pada proses negosiasi guna menyelesaikan konflik, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam proses negosiasi penyelesaian konflik haruslah bersifat netral dan juga imparisial. Netral artinya tidak memiliki kepentingan dan imparisial berarti tidak memihak. Dua sifat inilah yang dapat menunjang prinsip keempat dalam negosiasi.

Prinsip terakhir yakni memiliki alternatif dalam kesepakatan yang ingin dicapai, sehingga ketika suatu negosiasi gagal maka masih ada kesempatan untuk melaksanakan negosiasi lain dengan tujuan sama namun cara berbeda. Negara-negara yang terlibat dalam proses negosiasi, tidak hanya diwajibkan untuk mencari solusi baru terkait permasalahan yang terjadi tetapi juga sudah harus memikirkan alternatif kesepakatan lain apabila negosiasi yang dilakukan tidak menemukan kata sepakat. Tujuan dari

prinsip ini sederhana, yakni agar masalah yang membelit negara-negara dapat diselesaikan secara damai. Melihat kondisi dunia internasional dewasa ini, ada banyak masalah yang dihadapi oleh negara-negara didunia yang belum menemukan titik terang meskipun telah dilakukan proses negosiasi namun tetap belum tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak seperti Konflik Israel dan Palestina hingga masalah pengungsi Rohingya yang turut melibatkan Indonesia dan Australia.

5. Proses Negosiasi

Setelah mengetahui definisi, tujuan, sifat, prinsip hingga jenis negosiasi berdasarkan obyektifitasnya. selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana proses dalam negosiasi. Bagi orang-orang yang tidak mempelajari Ilmu Hubungan Internasional, proses negosiasi dalam benak mereka, dilakukan selayaknya proses tawar menawar dalam aktivitas dipasar tradisional namun secara lebih formal. Sesungguhnya, proses negosiasi antar negara-negara didunia yang diatur berdasarkan aturan main dalam Hubungan Internasional mencakup serangkaian agenda yang lebih dari sekedar duduk bersama dan melakukan negosiasi. Adapun **proses negosiasi itu sendiri mencakup, tahapan pre-negotiation, around the table serta packaging agreement.**

Grafik 2.1 . Proses Negosiasi



Sumber : G.R Berridge, *Diplomacy Theory and Practice*,
2005

Tahapan Pre-negotiation, dalam bukunya G.R Berridge mengatakan bahwa tahapan *pre-negotiation* adalah “*First stage of negotiations, where a great deal of negotiation is conducted in this stage.*¹³” Atau tahapan awal dari proses negosiasi, dimana hal-hal penting dalam agenda negosiasi diatur dalam tahapan ini. Tahapan *pre-negotiation* atau tahapan pra negosiasi menjadi suatu tahap yang tidak kalah penting dibanding tahapan ketika negosiasi itu sendiri berlangsung, karena dalam tahapan ini, negara-negara harus terlebih dahulu sepakat untuk bertemu dan melakukan proses negosiasi barulah setelahnya berbagai agenda yang akan dibahas dalam proses negosiasi juga harus sudah ditentukan dalam tahapan ini sehingga ketika para pemimpin negara bertemu dan saling bernegosiasi mereka akan langsung membicarakan pokok masalah yang memang menjadi isu penting bagi negara-negara tersebut.

Selain saling sepakat untuk bernegosiasi dan menyusun agenda negosiasi, dalam tahapan ini, negara yang terlibat dalam proses negosiasi juga sudah harus

¹³ Berridge, G.R, 2005, *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 29

saling bersepakat menentukan prosedur negosiasi.

Prosedur negosiasi ini sendiri mencakup format negosiasi, apakah negosiasi akan dijalankan secara bilateral atau multilateral. Kemudian, tempat dilangsungkannya negosiasi, delegasi yang akan dikirim sebagai wakil dari tiap-tiap negara dan juga waktu dilangsungkannya negosiasi. Tahapan pra negosiasi ini menjadi penting untuk dipersiapkan dan disepakati terlebih dahulu karena akan sangat menentukan kelancaran proses negosiasi itu sendiri.

Tahapan around the table, merupakan suatu tahapan saat negosiator melaksanakan apa yang telah dipersiapkan dalam tahap *prenegotiations*. Dengan kata lain, tahapan ini merupakan proses interaksi antar pihak-pihak yang terkait, baik secara bilateral maupun multilateral ataupun kombinasi keduanya mengenai apa saja yang telah dipersiapkan dalam *prenegotiations*. Proses dalam tahapan *around the table* merupakan proses yang jauh lebih rumit dibandingkan tahapan *prenegotiation*, hal ini dikarenakan tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan dalam sebuah proses negosiasi ditentukan dalam tahapan ini. **Dalam proses around the table, terdapat dua tahapan yakni formula stage dan juga detail stage.**

Formula stage, tahapan pertama dalam proses *around the table* adalah tahap formula pada tahap ini berisi formula yang akan dibawakan. pihak yang terkait akan saling berusaha untuk saling menyetujui prinsip-prinsip dasar penyelesaian. Adapun formula yang dimaksud adalah agenda-agenda yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam tahapan pra negosiasi.

Selanjutnya dalam tahapan formula ini, terdapat dua pendekatan dalam pelaksanaannya yakni; **deductive approach**, pendekatan berupa pola penyelesaian masalah melalui negosiasi dilakukan secara langsung mengenai pada inti persoalan. Serta **inductive approach**, yakni pola negosiasi dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan sederhana yang turut mempengaruhi persoalan yang dibahas dalam negosiasi dan selanjutnya menyelesaikan hal-hal yang lebih kompleks.

Detail stage, merupakan tahapan kedua setelah *formula stage* dalam proses *around the table*. *Detail stage* adalah suatu tahapan ketika pihak-pihak terkait memberikan penjelasan setelah formula disetujui. *Detail stage* merupakan tahapan yang paling sulit dan sering mengalami hambatan, karena masalah yang kompleks, kehati-hatian para pihak yang berimplikasi pada waktu negosiasi yang lama, dan bahkan ketidakpuasan antar pihak terkait.

Sedikitnya terdapat **lima kesulitan dalam detail stage yakni pendefinisian yang rumit**. Meskipun para pihak-pihak terkait telah sepakat akan agenda yang akan dibahas dalam proses negosiasi namun terkadang untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara tanpa mengesampingkan kepentingan nasional negara lain bukanlah perkara yang mudah.

Kesulitan kedua adalah **kendala komunikasi (miskomunikasi) penggunaan bahasa dalam proses negosiasi**. Meskipun Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional namun tidak dapat dipungkiri bagi sebagian besar negara-negara di dunia, Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua mereka sehingga wajar apabila terdapat keterbatasan

dalam penggunaan Bahasa Inggris, hal ini turut menjadi salah satu kesulitan dalam *detail stage*.

Selanjutnya adalah **tim negosiasi yang terdiri atas individu atau pemegang kekuasaan yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan**. Ketika pemimpin negara tidak dapat menghadiri pertemuan dalam proses negosiasi maka negara akan mengirimkan wakilnya dan terkadang wakil dari suatu negara ini, bukanlah sosok pemegang kekuasaan yang dapat mengambil keputusan, hal ini otomatis berpengaruh terhadap proses negosiasi itu sendiri karena perwakilan dari negara tersebut tentunya harus terlebih dahulu mendiskusikan hasil negosiasi dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi dibanding dirinya dan mampu mengambil ataupun mempengaruhi keputusan.

Kesulitan keempat adalah **memberikan kesempatan bagi salah satu atau kedua pihak untuk menyampaikan kepentingan dalam formula yang disepakati sesuai keinginan mereka**. Mengapa hal ini bisa menjadi kesulitan padahal negara hanya diminta untuk memberikan kesempatan dan mendengarkan negara lain untuk menyampaikan kepentingannya? Hal ini menjadi salah satu kesulitan apabila ternyata kepentingan yang disampaikan oleh negara tersebut bertentangan dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh negara lainnya. Pertentangan kepentingan ini sedikit banyak dapat memperpanjang proses negosiasi apalagi ketika negosiasi diorientasikan untuk mencapai hasil akhir dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kesulitan terakhir adalah **moment of truth**, adalah kondisi ketika tahapan *around the table* telah selesai dan kesepakatan telah tercapai serta hanya tinggal melihat bagaimana tiap-tiap negara yang telah bersepakat konsisten untuk melaksanakan hasil negosiasi. Ketika proses negosiasi telah selesai dan kesepakatan telah tercapai serta masing-masing negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ataupun meratifikasi perjanjian, bukan berarti semua pihak dapat bernafas lega, karena konsistensi tiap negara dalam melaksanakan perjanjian tersebut juga patut diawasi guna tercapainya negosiasi integratif yang seutuhnya.

Sebagai contoh, disepakatinya Protokol Kyoto dan juga KTT Iklim di Paris pada tahun 2015 lalu menunjukkan kepedulian negara-negara didunia terhadap masalah pemanasan global dan juga perubahan iklim namun masalah pemanasan global dan perubahan iklim tidak akan menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik apabila negara hanya sekedar bersepakat dan bertandatangan tanpa menunjukkan komitmen mereka serta konsistensi mereka dalam melaksanakan poin-poin yang telah menjadi kesepakatan bersama. Inilah yang dimaksud dengan *moment of truth*, yaitu ketika konsistensi serta komitmen negara dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati menjadi begitu penting.

Setelah melewati tahapan *around the table* dan masing-masing negara telah mencapai kesepakatan maka tahapan terakhir adalah **tahapan packaging agreement**, dalam tahapan ini, para pemimpin dari negara-negara yang telah bersepakat tersebut menandatangani perjanjian yang

berisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun masih ada satu unsur penting dalam proses negosiasi yang tidak boleh dilupakan yakni **diplomatic momentum**.

Diplomatic momentum adalah salah satu unsur terpenting dalam diplomasi terutama proses negosiasi. *Diplomatic momentum* dibutuhkan agar ditengah proses negosiasi yang alot, tujuan dari negosiasi masih dapat tercapai dan proses negosiasi tidak terhenti ditengah jalan. Proses negosiasi tidak selalu berjalan lancar terkadang proses negosiasi kerap kali berjalan alot, proses negosiasi yang tidak berjalan lancar dan tidak memberikan kemajuan justru menyebabkan negosiasi dapat terhenti, dalam kondisi seperti inilah, *diplomatic momentum* dibutuhkan. Dengan kata lain, *diplomatic momentum* bertujuan untuk memastikan agar proses negosiasi dapat berjalan secara efektif dan meraih hasil akhir yakni *win win solution*.

Beberapa metode dalam diplomatic momentum yang dapat digunakan antara lain : deadlines, metaphors of movement, publicity dan raising the level of talks. Namun dalam pembahasan kali ini, kita akan menitikberatkan pada **deadlines**. *Deadlines* adalah salah satu metode dalam *diplomatic momentum* yang paling sering digunakan dan juga paling efisien dalam menyelesaikan proses negosiasi yang berjalan alot.

Deadlines sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni artificial deadlines, symbolic deadlines dan juga practical deadlines. Tabel dibawah berisikan penjelasan terkait perbedaan diantara ketiga jenis deadlines tersebut, guna memudahkan mahasiswa dalam memahami maka perbedaan diantara ketiga jenis deadlines akan dilihat

berdasarkan tanggal tenggat waktu, kekuatan negosiator, sanksi yang diberikan serta kasus dalam deadlines jenis tersebut kerap digunakan.

Tabel 2.1. Perbedaan Jenis Deadlines

	Artificial Deadlines	Symbolic Deadlines	Practical Deadlines
Due Date	Clear Date. Decided by the bigger power	Based on Events. Implemented as Symbol	Scheduled. Detail Stage
Power of Negotiator	Unbalance Power	Balance Power	Balance Power
Sanction	Not Punitive. Moral Sanction	Not Punitive	Punitive
Case	Arbitration	Conflict Resolution	Sustainable Cooperation

Berdasarkan tabel diatas, **artificial deadlines** memiliki tenggat waktu yang jelas, yang ditentukan oleh negara dengan kekuatan yang lebih besar, karena negara dengan kekuatan yang lebih besar mampu menentukan tanggal tenggat waktu, maka tidak mengejutkan apabila negara dengan kekuatan yang lebih besar memiliki keuntungan dari segi kekuatan negosiator sehingga berdasarkan kekuatan negosiator tidaklah berimbang. Tidak ada sanksi hukum yang diberikan kepada negara yang tidak menaati *artificial deadlines* ini, hanya terdapat sanksi moral saja.

Sementara untuk contoh kasusnya, *artificial deadlines* kerap digunakan dalam kasus-kasus arbitrase seperti deadlines pengembalian Hong Kong dari Inggris kepada China atau yang lebih dikenal dengan Sino-British Negotiation. Dalam negosiasi tersebut, Inggris sebagai negara dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan China, menentukan tenggat waktu pengembalian Hong Kong kepada China yakni pada tanggal 1 Juli 1997.

Selanjutnya adalah *symbolic deadlines*, dimana berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan namanya maka tenggat waktu dalam *symbolic deadlines* menyesuaikan dengan *event-event* tertentu yang kemudian dijadikan sebagai simbol. Tidak seperti *artificial deadlines*, dalam *symbolic deadlines* kekuatan negosiator berimbang namun tidak ada sanksi hukum yang diberikan kepada negara yang tidak menaati *symbolic deadlines* ini, sama seperti *artificial deadlines*.

Sementara untuk contoh kasusnya, *symbolic deadlines* kerap digunakan dalam resolusi konflik seperti penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Inggris dan pemerintah Irlandia tahun 1997 yang dilakukan pada Jumat Agung sehingga dikenal sebagai Good Friday Agreement. Perjanjian ini ditandatangani di Belfast, Irlandia Utara.

Terakhir adalah **practical deadlines**, yaitu tanggal tenggat waktu telah terjadwal dengan baik sejak proses *around the table*. Sama seperti *symbolic deadlines*, dalam *practical deadlines*, kekuatan negosiator juga berimbang dan negara yang tidak menaati *deadlines* ini akan mendapatkan sanksi. Hal ini karena tindakan suatu negara yang tidak

menaati *deadlines* ini, akan berdampak bagi negara lainnya karena *practical deadlines* sendiri kerap digunakan dalam proses kerjasama berkelanjutan seperti Uruguay Round tahun 1990-1994.

Simpulan

Negosiasi adalah salah satu unsur paling penting dalam praktik diplomasi. Negosiasi dilakukan oleh negara guna mencapai kepentingan nasionalnya baik melalui kerjasama dengan negara lain dan juga meredam konflik hingga menyelesaikan konflik. Proses negosiasi merupakan suatu proses yang panjang sehingga memerlukan persiapan yang matang agar proses negosiasi dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak jarang, proses negosiasi berjalan alot dan berpotensi terhenti di tengah jalan, negara-negara tetap dapat menghidupkan proses negosiasi melalui *diplomatic momentum*, salah satunya adalah melalui *deadlines*.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Sebutkan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip negosiasi dan mengapa proses negosiasi perlu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur tersebut ?

- 1.2 Buatlah suatu skema skenario proses negosiasi bilateral, mulai dari tahapan *pre-negotiation*, *around the table* hingga *packaging agreement* !
- 1.3 Cari contoh kasus perjanjian yang menggunakan *artificial deadlines*, *symbolic deadlines* dan juga *practical deadlines* sebagai *diplomatic momentum* !

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait negosiasi dan proses dari negosiasi itu sendiri. Fasilitator akan memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

G.R Berridge. 2005. *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, Palgrave MacMillan, New York.

Fisher, Roger, William Ury with Bruce Patton. 1991. *Getting to Yes : Negotiating an Agreement Without Giving in*, Century Business, Sydney.

Gary Goddpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta.

BAB III

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan tentang sejarah terbentuknya kementerian luar negeri, tugas kementerian luar negeri, perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler, tanggung jawab dan fungsi diplomat, tanggung jawab dan fungsi konsulat jendral hingga kekebalan diplomatik.

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari sejarah terbentuknya kementerian luar negeri, tugas dari kementerian luar negeri, tanggung jawab dan fungsi diplomat dan konsulat jendral serta perbedaan antara perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler hingga kekebalan diplomatik.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang sejarah terbentuknya kementerian luar negeri, apa saja yang menjadi tugas dari kementerian

luar negeri, perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler, tanggung jawab dan fungsi diplomat, tanggung jawab dan fungsi konsulat jenderal hingga kekebalan diplomatik. Pemahaman awal ini akan lebih memudahkan mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang model dan gaya dalam berdiplomasi.

4. Manfaat Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu mengetahui dan menganalisa sejarah terbentuknya hingga misi-misi dan juga pelayanan yang dilakukan oleh kementerian luar negeri, mengetahui tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler serta mengetahui apa saja yang termasuk dalam kekebalan diplomatik dan mengapa seorang perwakilan diplomatik memerlukan kekebalan.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Dalam bab satu, telah dijelaskan mengapa negara perlu melakukan praktik diplomasi. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa negara perlu melakukan praktik diplomasi

tidak hanya agar tercapainya kepentingan nasional negaranya tetapi juga agar terciptanya perdamaian dunia.

1. Tujuan Diplomasi

Terdapat empat tujuan dari diplomasi yang selaras dengan penjelasan mengapa negara perlu melakukan praktik diplomasi. Tujuan diplomasi tersebut adalah *acquisition* atau membuat hubungan baik dengan negara lain (hubungan diplomatik) yang dilanjutkan dengan *preservation* yakni menjaga hubungan baik tersebut. Kementerian luar negeri adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam proses pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara, kementerian luar negeri tidak hanya melakukan rentetan proses negosiasi dengan negara lain tetapi juga memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan *acquisition* dan *preservation*.

Guna membuat hubungan baik dengan negara lain atau hubungan diplomatik (*acquisition*) kemudian menjaga hubungan diplomatik tersebut (*preservation*), kementerian luar negeri mengirimkan perwakilannya yang dikenal sebagai diplomat. Sampai disini, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dari seorang diplomat adalah guna menjaga hubungan diplomatik yang terjalin diantara negara pengirim (negara asal sang diplomat) dan juga negara penerima (negara tempat diplomat tersebut ditugaskan).

Namun tugas seorang diplomat sesungguhnya lebih dari sekedar menjaga hubungan diplomatik diantara kedua negara saja. Tugas seorang diplomat dapat dikatakan tidaklah mudah. Hal ini yang menjadi dasar mengapa seorang

diplomata membutuhkan kekebalan diplomatik. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa saja yang menjadi tugas dari seorang diplomat dan mengapa ia membutuhkan kekebalan diplomatik, mahasiswa terlebih dahulu akan diajak untuk memahami hal-hal dasar tentang kementerian luar negeri, yang dimulai dari sejarah terbentuknya hingga tugas dan fungsi dari kementerian luar negeri itu sendiri.

2. Sejarah Diplomasi dan Kementerian Luar Negeri

Dewasa ini, praktik diplomasi tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara tetapi juga dapat dilakukan oleh aktor non negara, hal ini berkaitan pula dengan perkembangan metode diplomasi yang dipengaruhi oleh globalisasi. Namun meskipun begitu, aktor negara tetaplah menjadi aktor utama dalam praktik diplomasi.

Berbicara tentang praktik diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara maka tidak dapat dipisahkan dari diplomat. Diplomat adalah perwakilan dari suatu negara yang ditunjuk langsung oleh pemerintah negara tersebut untuk mewakili negaranya dalam mencapai kepentingan nasional dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang sejarah perkembangan kementerian luar negeri yang tidak hanya menaungi para diplomat tetapi juga para konsuler dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri.

Pada abad ke-17, diplomasi dinegara-negara Eropa kala itu berjalan dibawah beberapa lembaga yang berbeda, berdasarkan pada basis geografis negara sahabat, lembaga ini lebih dikenal sebagai *Secretaries of State*. Sosok Cardinal

Richelieu-lah yang kemudian memiliki ide untuk membentuk suatu lembaga yang secara khusus mengatur permasalahan hubungan diplomatik¹⁴. Cardinal Richelieu adalah sosok yang dihormati dalam gereja katolik di Perancis, ia pun turut terlibat aktif dalam pemerintahan Raja Perancis Louis XIII, dengan menjabat sebagai sekretaris urusan luar negeri atau *foreign secretary*.

Menurut Cardinal Richelieu, keberadaan suatu lembaga khusus yang mengatur permasalahan diplomatik akan sangat membantu tugas para diplomat dan juga dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik yang berkelanjutan dengan Negara Eropa lainnya. Menurutnya, proses negosiasi maupun kerja sama yang terjalin diantara negara-negara secara berkelanjutan membutuhkan tidak hanya birokrasi yang berkelanjutan dinegara asal tetapi juga sebuah badan/lembaga birokrasi yang kompeten yang mampu menjalankan tugas diplomasi dengan baik. Pengaruh pemikiran Cardinal Richelieu inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kementerian luar negeri. Perancis pun tercatat sebagai negara pertama yang memiliki kementerian luar negeri¹⁵.

Pada abad ke-18, barulah kementerian luar negeri secara resmi memiliki pemimpin yang disebut dengan menteri luar negeri. Tahun 1782, Inggris mengikuti Jejak Perancis membentuk kementerian luar negeri, disusul oleh Amerika di tahun 1789. Memasuki pertengahan abad ke-19

¹⁴ Berridge, G.R, 2005, *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 5

¹⁵ *ibid*

banyak negara-negara di Asia, seperti Tiongkok, Jepang dan Turki yang juga membentuk kementerian luar negeri¹⁶.

Di abad ke-19, ketika sudah mulai banyak negara-negara di dunia yang memiliki kementerian luar negeri, secara perlahan kementerian luar negeri mulai memiliki struktur kelembagaan serta pembagian tugas yang jelas. **Struktur maupun pembagian tugas ini terbagi melalui dua hal yakni berdasarkan fungsi tertentu seperti protokol atau perjanjian serta berdasarkan region secara geografis.**

Apabila mengambil contoh dalam kementerian luar negeri Indonesia, divisi yang memiliki tugas berdasarkan region secara geografis disebut sebagai direktorat jenderal. Beberapa contoh direktorat jenderal yang terdapat dalam kementerian luar negeri Indonesia antara lain Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Dirjen Amerika dan Eropa serta Dirjen Kerjasama ASEAN¹⁷.

Adapun tugas dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan

¹⁶ Ibid. Hlm 6

¹⁷ Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur_organisasi/struktur-organisasi pada tanggal 6 agustus 2019

luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika¹⁸.

Selain itu berdasarkan pasal 152, fungsi dari Dirjen Asia Pasifik dan Afrika antara lain¹⁹:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral,

¹⁸ Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/43/direktur-jenderal-asia-pasifik-dan-afrika pada tanggal 6 agustus 2019

¹⁹ ibid

intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika

- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Kemudian, divisi yang memiliki tugas berdasarkan fungsi tertentu dalam kementerian luar negeri Indonesia, disebut sebagai Staf Ahli. Adapun beberapa contoh Staf Ahli dalam kementerian luar negeri Indonesia antara lain Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia diluar negeri²⁰.

Pembagian tugas dalam Kementerian Luar Negeri ini bertujuan agar praktik diplomasi yang dilakukan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain mulai memiliki struktur kelembagaan serta pembagian tugas yang jelas, pada abad ke-19 kementerian luar negeri juga mulai menempatkan seorang pejabat senior secara permanen disebuah negara dengan tujuan tugas dan kinerja dari kementerian luar negeri itu sendiri²¹. Penempatan pejabat senior secara permanen ini kemudian dikenal sebagai ***Resident Ambassadors***, yang **terbagi menjadi dua perwakilan yakni perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler.**

²⁰ Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur_organisasi/struktur-organisasi pada tanggal 6 agustus 2019

²¹ Berridge, G.R, 2005, *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 9

3. Penempatan Diplomat dan Staf Lain di Luar Negeri

Alasan utama dibentuknya kementerian luar negeri adalah untuk merekrut orang-orang yang kompeten yang nantinya akan ditunjuk sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, kemudian mengirim perwakilan diplomatik tersebut sebagai perwakilan negara kepada negara sahabat, negara membiayai serta menjaga kehidupan perwakilan diplomatik selama menjalankan tugasnya dinegara sahabat dan bertukar informasi dan komunikasi secara reguler dan aman dengan perwakilan diplomatik di luar negeri. **Perwakilan suatu negara kepada negara lain terdiri dari dua perwakilan yakni perwakilan diplomatik (diplomat) dan juga perwakilan konsuler (konsulat jenderal).**

Bagi masyarakat awam, diplomat yang menjadi perwakilan diplomatik suatu negara dikenal juga sebagai duta besar (dubes). Tidak banyak yang tahu bahwa diplomat bukan hanya duta besar tetapi juga duta dan juga kuasa usaha. Lalu apa perbedaan diantaranya ? mari kita mulai dengan diplomat. Diplomat memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, yang antara lain adalah untuk membina, menjaga dan menyelenggarakan hubungan diplomatik yang lancar dengan pemerintah negara penerima.

Selain itu, diplomat juga memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna dari negara penerima kepada negara pengirim, menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan politik internasional, merepresentasikan bangsa dan negara sendiri diluar negeri serta melindungi warga negara sendiri diluar negeri.

Sesuai dengan tanggung jawabnya maka fungsi dari seorang Diplomat antara lain:

- a. Mewakili negara pengirim
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya didalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
- c. Berunding dengan negara penerima
- d. Mengetahui dengan cara-cara yang sah keadaan didalam negara penerima dan secara rutin melaporkannya kepada negara pengirim, serta
- e. Memajukan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima.

Selanjutnya, apa yang membedakan antara duta besar, duta dan kuasa usaha ? **Duta besar** adalah duta yang berada ditingkatan tertinggi serta mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Biasanya ditempatkan dinegara-negara yang mempunyai hubungan timbal balik. **duta** adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan persoalan kedua negara, ia diharuskan untuk berkonsultasi dengan pemerintah negara pengirim. Adapun **kuasa usaha** adalah pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh menteri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Kuasa usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara, tetapi kuasa usaha ditempatkan oleh menteri luar negeri negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima.

4. Perbedaan Diplomat dan Konsulat Jenderal

Selain diplomat, perwakilan suatu negara kepada negara lain dapat pula dilakukan oleh konsulat jendral sebagai perwakilan konsuler. **Sesuai pasal 5 Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan optimalisasi protokol tahun 1963, fungsi dari perwakilan konsuler antara lain;**

- a. **Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam negara penerima didalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional**
- b. **Memajukan hubungan dagang, ekonomi, ilmiah dan kebudayaan diantara dua negara,**
- c. **Mengeluarkan paspor dan dokumen yang pantas untuk orang yang ingin berpergian ke negara pengirim**
- d. **Bertindak sbg notaris dan pencatat sipil serta melakukan peraturan perundang-undangan negara penerima.**

Tabel 3.1 Perbedaan Diplomat dan Konsulat Jenderal

Diplomat	Konsulat Jenderal
Tugasnya dalam bidang politik	Tugasnya dalam bidang non politik
Hanya 1 perwakilan dan ditempatkan di ibu kota negara	Lebih dari 1 perwakilan, tergantung kebutuhan
Surat tugas ditandatangani oleh kepala negara	Surat tugas ditandatangani oleh menteri luar negeri
Dapat mempengaruhi	Harus tunduk kepada

Konsulat Jenderal	diplomat
Memiliki daerah ekstrateritorial	Tidak memiliki daerah ekstrateritorial
Dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima	Hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat (daerah), jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat negara penerima maka harus melalui diplomat
Hak imunitasnya penuh	Hak imunitasnya sebagian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa diplomat dan konsulat jenderal memiliki sejumlah perbedaan, dimulai dari ranah tugas yang diemban, antara lain adalah:

- a. Diplomat memiliki tugas dalam bidang politik sementara konsulat jenderal memiliki tugas dalam bidang non politik.
- b. Diplomat hanya memiliki 1 perwakilan yang disebut sebagai Kedutaan Besar dan bertempat di ibu kota negara penerima sementara konsulat jenderal bisa memiliki lebih dari 1 perwakilan dan tidak harus ditempatkan di ibu kota negara penerima.
- c. Surat tugas diplomat ditandatangani oleh kepala negara sementara konsulat jenderal oleh menteri luar negeri.
- d. Diplomat memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan konsulat jenderal, hal ini terlihat dari hak imunitas yang dimilikinya, daerah ekstrateritorial

atau daerah yang memiliki kekebalan diplomatik serta pengaruh terkait hubungan dengan pemerintah negara penerima.

- e. Beberapa perbedaan lainnya antara diplomat dan juga konsulat jenderal yakni terkait dimulainya masa tugas dan berakhirnya masa tugas perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

Para diplomat akan mulai menjalankan tugasnya setelah negara penerima mendapatkan surat kepercayaan dari negara pengirim yang diberikan secara langsung oleh sang diplomat, hal ini sesuai dengan aturan Konvensi Wina 1961. Adapun proses pembukaan perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 adalah kedua belah pihak/negara melakukan pertukaran informasi. Masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan perwakilan diplomatik.

Setelah ada persetujuan, maka diplomat akan menerima Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*). Para diplomat kemudian harus menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri. Surat kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung oleh diplomat kepada kepala negara penerima. Adapun, surat kepercayaan kuasa usaha, diberikan kepada menteri luar negeri negara penerima. **Sementara konsulat jenderal mulai menjalankan tugasnya setelah negara penerima mendapatkan pemberitahuan yang layak dari negara pengirim, hal ini sesuai dengan aturan dalam Konvensi Wina 1963.**

Kemudian, berakhirnya masa tugas diplomat dan konsulat jenderal pun berbeda. **Diplomat dapat berakhir**

masa tugasnya apabila sang diplomat tidak disenangi negara penerima. Sebagai perwakilan dari suatu negara, para diplomat harus mendapatkan persetujuan dari negara penerima sebelum bisa mulai melakukan tugasnya. Salah satu tugas dari para diplomat tersebut adalah menjaga hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima sehingga penting kiranya bagi seorang diplomat untuk bersikap baik kepada pemerintah negara penerima. Apabila pemerintah negara penerima merasa tidak suka dengan sang diplomat, mereka memiliki hak untuk menolak keberadaan sang diplomat dan mengakhiri masa tugasnya. **Selanjutnya, masa tugas diplomat dapat berakhir apabila negara penerima dan pengirim berperang serta sudah habis masa jabatannya dan ditarik oleh pemerintah negaranya.**

Masa tugas konsulat jenderal sendiri dapat berakhir apabila ia mendapatkan pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai staf konsuler, pemberitahuan ini biasanya datang dari negara pengirim. **Kemudian penarikan dari negara pengirim serta fungsi pejabat konsuler telah berakhir.** Namun perlu diketahui bahwa pemutusan hubungan diplomatik antara negara pengirim dan penerima, baik yang dikarenakan konflik ataupun perang tidak secara otomatis berdampak pada pemutusan hubungan konsuler. Dengan kata lain, meskipun suatu negara menarik diplomatnya dikarenakan adanya ketegangan dengan negara penerima, konsulat jenderal negara pengirim yang berada dinegara penerima tetap dapat bekerja menjalankan tugasnya seperti biasa.

Pembukaan hubungan diplomatik melalui penerimaan dan pengiriman perwakilan diplomatik oleh negara, awalnya diatur dalam Hukum Internasional, yang disebut sebagai hak legasi. Terdapat dua jenis hak legasi yakni hak legasi aktif dan hak legasi pasif. **Hak legasi aktif adalah hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya kenegara lain. Sementara hak legasi pasif adalah kewajiban suatu negara untuk menerima wakil-wakil dari negara asing.**

Hak legasi ini diterima oleh Konvensi Havana tahun 1928 seperti yang tercantum dalam pasal 1 dalam konvensi tersebut. Namun dalam perkembangannya hak legasi ini berangsur-angsur sudah ditinggalkan, dikarenakan hak legasi ini tidak boleh dipaksakan kepada semua negara. Seperti disebutkan oleh Prof. Fhauchille, bahwa tidak suatu negara pun yang diharuskan menerima duta besar negara lain, itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan masalah hukum murni.

Pembukaan hubungan diplomatik harus dilaksanakan apabila telah terdapat kesepakatan bersama antara kedua negara. Hal ini seperti ditegaskan dalam Konvensi Wina tahun 1961, bahwasanya pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaan misi diplomatik, terjadi dengan persetujuan timbal balik. Dengan terjadinya kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam persetujuan bersama atau perjanjian bilateral, maka kedua negara tersebut harus dapat menerima segala konsekuensinya. Kedua negara tersebut harus menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu perjanjian tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari manapun juga.

5. Kekebalan Diplomatik

Pada akhir 1959, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 1950 memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk membahas masalah kekebalan diplomatik. Konferensi dengan nama *The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961. Konferensi ini, menghasilkan 3 instrumen: *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*, dan *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*.

Menurut Konvensi Wina 1961, **perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara serta menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.** Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut "*exterritoriality*" atau "*extra territoriality*".

Kekebalan diplomatik ini sendiri meliputi hak imunitas, Para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima atau seperti dinegara mereka sendiri. Hal ini membuat para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.

Hak atas kantor dan rumah kediaman, serupa seperti para diplomat yang bekerja maupun tinggal didalamnya, kantor beserta kediaman para diplomat juga

harus diperlakukan layaknya wilayah negara mereka sendiri atau berada diluar wilayah negara penerima. Kantor kedutaan besar maupun kediaman para diplomat berdasarkan hukum internasional merupakan wilayah yuridiksi dari negara pengirim sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun termasuk negara penerima. Terakhir adalah **kekebalan terhadap korespondensi**, korespondensi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen berharga yang berada didalam kantor kedutaan besar maupun rumah kediaman para diplomat.

Mengapa perwakilan diplomatik perlu diberikan kekebalan diplomatik ? Hal ini karena perwakilan diplomatik memiliki tugas yang berat yakni untuk melindungi warga negaranya dinegara penerima sehingga perwakilan diplomatik dari negara pengirim wajib dilindungi keselamatannya oleh negara penerima. Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik juga sangat dibutuhkan sebab sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional khususnya yang mengancam keselamatan perwakilan diplomatik sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka.

Tindakan yang dilakukan suatu negara dalam perpolitikan internasional sedikit banyak dapat mempengaruhi keselamatan perwakilan diplomatik negara tersebut dinegara penerima. Contoh sederhana, apabila masyarakat suatu negara merasa tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara lain maka mereka akan melakukan aksi demonstrasi didepan kantor kedutaan besar negara tersebut. Hal ini pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Contoh tahun 2017 lalu, masyarakat

Indonesia memprotes kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat terkait pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Jerusalem. Hal ini kemudian menuai protes keras dari masyarakat Indonesia dan mereka pun melakukan demonstrasi di depan kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di Jakarta.

Contoh lain, mahasiswa dapat melihat dari salah satu film Hollywood yang diangkat berdasarkan kisah nyata berjudul *Argo*, yang rilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang kedutaan besar Amerika Serikat yang didemonstrasi hingga kemudian diserang oleh kelompok militan di Tehran, Iran pada 4 November 1979. Demonstrasi dan penyerangan ini dilakukan terkait protes dari masyarakat Iran terhadap kebijakan Amerika Serikat terkait revolusi Iran.

Sampai disini, mahasiswa mungkin masih ada yang menyangsikan mengapa seorang diplomat membutuhkan kekebalan diplomatik. Kalau pun ada kebijakan suatu negara yang ditolak dan diprotes oleh masyarakat negara penerima, mereka hanya akan melakukan aksi demonstrasi saja. Namun yang perlu diingat adalah aksi demonstrasi tidak selalu berjalan secara damai, tidak jarang aksi demonstrasi berakhir ricuh.

Kembali kepada contoh dari film *Argo*, ketika aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok militan di Tehran didepan kedutaan besar Amerika Serikat pada saat itu berakhir dengan ricuh. Kelompok militan tersebut berhasil meringsek masuk kedalam kedutaan besar Amerika Serikat dan menawan para perwakilan diplomatik Amerika Serikat.

Beberapa contoh yang telah disebutkan diatas, menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan keselamatan dari perwakilan diplomatik disuatu negara. Para perwakilan diplomatik tersebut dapat menjadi sasaran empuk tindak kekerasan dengan alasan tidak sepakat dengan kebijakan yang ambil oleh pemerintah negara perwakilan diplomatik tersebut.

Ditahun 2012, seorang diplomat Saudi tewas ditembak oleh seorang lelaki bersenjata di Bangladesh. Setelah dilakukan penyelidikan, sang diplomat tewas terkait ketegangan yang terjadi diantara kedua negara setelah sebelumnya Arab Saudi mengeksekusi delapan pekerja Bangladesh karena dituduh terlibat dalam perampokan bersenjata²². Sungguh suatu ironi bahwa perwakilan diplomatik tetap merupakan sasaran empuk dikarenakan mereka kurang mendapat pengamanan walaupun mereka telah memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961. Mereka kerap dijadikan sasaran pembunuhan untuk mendramatisasikan tuntutan suatu kelompok masyarakat, umumnya suatu kelompok ekstrim dan/atau kelompok terorisme dari negara penerima, namun tidak menutup kemungkinan dijadikan incaran juga oleh kelompok teroris dari kalangan bangsa lain.

Selain mendapatkan kekebalan diplomatik, perwakilan diplomatik juga mendapatkan keistimewaan diplomatik. Pemberian keistimewaan diplomatik kepada perwakilan diplomatik, atas dasar "timbang – balik" sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963,

²² Seorang Diplomat Saudi Tewas Dibunuh di Bangladesh diakses melalui www.voaindonesia.com pada tanggal 6 juli 2019

yaitu mencakup; pembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya. Selain itu juga bebas dari kewajiban pabean, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

Simpulan

Kementerian luar negeri adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menjalankan politik luar negeri suatu negara. Dalam proses menjalankan politik luar negeri tersebut, kementerian luar negeri memiliki perwakilan yang dapat mewakili negara dalam mencapai kepentingan nasional. Perwakilan ini antara lain perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler memiliki ranah tugas, fungsi, tanggung jawab dan juga keistimewaan yang berbeda satu sama lain. Selain itu keduanya juga memiliki kesamaan yakni sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga warga negara pengirim dinegara penerima dan melindungi kepentingan nasional negara pengirim. Terkait tanggung jawab tersebut, maka perwakilan diplomatik pun mendapatkan kekebalan diplomatik dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini diberikan sesuai dengan aturan dalam Konvensi Wina dan ditujukan agar perwakilan diplomatik yang berada dinegara penerima dapat terjamin keamanan dan keselamatannya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Jelaskan perbedaan antara duta besar, duta dan kuasa usaha !
- 1.2 Jelaskan perbedaan antara perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler !
- 1.3 Carilah contoh kasus penyerangan yang dilakukan kepada perwakilan diplomatik suatu negara dinegara penerima !

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait sejarah perkembangan kementerian luar negeri, tugas dan fungsi dari kementerian luar negeri hingga unsur-unsur didalam kementerian luar negeri itu sendiri seperti perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler dan kekebalan diplomatik. Fasilitator akan memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

G.R Berridge. 2005. *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, Palgrave MacMillan, New York.

Portal Kementerian Luar Negeri diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id#>

Seorang Diplomat Saudi Tewas Dibunuh di Bangladesh
diakses melalui www.voaindonesia.com

BAB IV

MODES AND METHODS IN DIPLOMACY

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan tentang berbagai model dalam berdiplomasi seperti diplomasi dalam bentuk korespondensi, diplomasi melalui telepon, mediasi hingga diplomasi bilateral dan multilateral kemudian mahasiswa juga mampu menguraikan tentang metode dalam berdiplomasi terutama *soft diplomacy*.

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari berbagai model serta metode dalam berdiplomasi.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang model dan metode dalam berdiplomasi, dimulai dari korespondensi diplomasi, *telephone diplomacy*, mediasi, diplomasi multilateral, diplomasi bilateral baik yang konvensional maupun yang unconventional. Selain itu juga dibahas mengenai berbagai metode atau gaya dalam berdiplomasi terutama bentuk-

bentuk *soft diplomacy* seperti “diplomasi panda” hingga “K-pop diplomasi” sehingga akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi.

4. Manfaat Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu mengetahui dan menganalisa gaya dan juga metode dalam berdiplomasi, jenis-jenis korespondensi diplomatik, mampu menganalisa perbedaan diplomasi bilateral *conventional* dan *unconventional*, diplomasi multilateral, mediasi hingga gaya dalam berdiplomasi terutama *soft diplomacy* seperti diplomasi panda hingga K-pop diplomasi.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Praktik diplomasi memang identik dengan negosiasi namun bukan berarti diplomasi hanya dapat dilakukan melalui cara negosiasi saja. Sejak awal perkembangan praktik diplomasi, negara telah menerapkannya tidak hanya dengan cara melakukan pertemuan secara langsung dan melakukan perundingan tetapi negara juga melakukan

praktik diplomasi melalui surat menyurat yang kemudian lebih dikenal dengan korespondensi diplomatik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik diplomasi pun turut berkembang. Negara kini dapat melakukan diplomasi melalui telepon, *video conference* hingga melalui sosial media. Perkembangan teknologi ini diiringi pula dengan semakin berkembangnya isu dalam hubungan internasional.

Diplomasi bukanlah suatu konsep yang kaku, melainkan diplomasi merupakan suatu konsep yang fleksibel. Hal ini terlihat melalui perkembangan isu yang kemudian turut berpengaruh pada perkembangan praktik diplomasi itu sendiri. Dewasa ini ada banyak praktik diplomasi yang diberikan penamaan sesuai dengan isu yang menjadi fokus dari diplomasi tersebut.

Dalam bab ini, mahasiswa akan diajak untuk mengenal metode dalam berdiplomasi, salah satu metodenya adalah *soft diplomacy*. *Soft diplomacy* inilah yang semakin sering diterapkan oleh negara-negara didunia mengikuti perkembangan isu dalam hubungan internasional.

Namun sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih detail tentang *soft diplomacy*, hendaklah terlebih dahulu mahasiswa mengenal model dalam berdiplomasi seperti korespondensi diplomasi hingga *telephone diplomacy*.

1. Korespondensi Diplomatik

Pada bab dua, kita telah membahas tentang salah satu bentuk diplomasi yang paling populer dan paling sering digunakan yakni negosiasi. Dalam bab ini, kita akan

membahas lebih dalam tentang berbagai bentuk diplomasi, bahwa diplomasi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan bilateral maupun multilateral tetapi diplomasi juga dapat dilakukan secara tertulis atau lebih dikenal sebagai korespondensi diplomatik. **Terdapat beberapa jenis korespondensi diplomatik, antara lain : nota, memorandum, aide memoire serta pro memoire.**

- a. **Nota**, ialah cara melakukan hubungan antar negara melalui Departemen Luar Negeri masing-masing negara atau perwakilan diplomatik dan pejabat tinggi lainnya. Nota merupakan istilah umum yang digunakan, merujuk pada surat-surat, terutama yang dipergunakan dalam melakukan hubungan diplomatik. **Nota selalu dipergunakan jika persoalan yang dikemukakan penting sekali atau apabila nota tersebut bersifat pribadi.** Terdapat beberapa jenis nota, antara lain: nota diplomatik, nota kolektif, nota identik, nota verbal dan juga nota edaran. Masing-masing dari jenis nota tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Nota diplomatik adalah nota yang dikirimkan oleh suatu pemerintah melalui Departemen Luar Negerinya kepada pemerintah negara lain yang juga ditujukan melalui Departemen Luar Negeri Negara tersebut. Selain antar Departemen Luar Negeri sebagai wakil pemerintah, nota diplomatik juga bisa dikirimkan dari perwakilan diplomatik negara pengirim kepada negara penerima.

Berbeda dengan nota diplomatik yang hanya melibatkan korespondensi antara dua negara, nota kolektif melibatkan

lebih dari dua negara. Sesuai dengan namanya, **Nota Kolektif adalah nota yang dikirimkan oleh suatu negara kepada beberapa negara.** Nota kolektif kerap kali berisikan tentang kerjasama dalam bidang politik. Selain itu ada juga, nota identik hampir sama seperti nota kolektif yaitu juga melibatkan lebih dari dua negara akan tetapi konteks dari nota identik berbeda dari nota kolektif.

Nota identik digunakan apabila dua negara atau lebih mengajukan sesuatu kepada negara ketiga. Sebagai contoh, terdapat dua negara yang sedang berkonflik dan dalam proses rekonsiliasi konflik diantara kedua negara tersebut. Keduanya sepakat untuk melakukan mediasi yang difasilitasi oleh negara lain sebagai pihak ketiga, maka kedua negara tersebut akan mengirimkan nota identik kepada negara yang mereka percayai untuk menjadi pihak ketiga dalam proses rekonsiliasi konflik tersebut.

Selanjutnya adalah nota verbal. **Nota Verbal adalah suatu nota yang dipergunakan sebagai bukti tertulis yang merupakan ringkasan dari suatu pembicaraan antar pemerintah,** baik pembicaraan secara langsung melalui negosiasi maupun pemberitahuan melalui pesan. Nota verbal dibuat di bawah nama menteri luar negeri ataupun duta besar selaku kepala perwakilan diplomatik, tergantung keadaan.

Terakhir adalah jenis nota edaran. **Nota Edaran merupakan surat edaran dari kementerian luar negeri kepada tiap-tiap korps perwakilan diplomatik maupun konsuler yang berada dinegara penerima.** Dapat disimpulkan bahwa dari semua jenis nota, hanya nota edaran yang tidak melibatkan dua negara atau lebih atau dapat dikatakan nota edaran adalah korespondensi diplomatik

secara internal karena merupakan surat edaran dari kementerian luar negeri suatu negara kepada perwakilan diplomatik ataupun konsuler negaranya yang berada dinegara penerima. Selain nota, masih terdapat beberapa jenis korespondensi diplomatik lainnya, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah memorandum.

- b. **Memorandum merupakan suatu pernyataan tertulis dari suatu kementerian luar negeri kepada kedutaan/perwakilan diplomatik atau sebaliknya.** Kemudian, apa yang membedakan antara memorandum dan nota edaran ? Perbedaan antara memorandum dan nota edaran terletak pada penerima dari korespondensi tersebut, yakni apabila memorandum hanya melibatkan satu perwakilan diplomatik saja sebagai penerima korespondensi, maka berbeda dengan nota edaran yang mana penerimanya adalah tiap-tiap korps perwakilan diplomatik maupun konsuler suatu negara yang berada dinegara penerima.
- c. **Aide memoire yakni sejenis nota yang merupakan bukti tertulis yang informal (*informal summary*) dari suatu pembicaraan diplomatik (*diplomatic interview conversation*)** atau juga suatu percakapan atau catatan tidak resmi dari sebuah *interview* antara menteri luar negeri atau pihak departemen luar negeri dengan seorang duta asing. Catatan semacam ini lazimnya diserahkan oleh sang duta di kementerian luar negeri atau pihak departemen luar negeri kepada sang duta negara yang dimaksud. Kegunaan dari aide memoire ini adalah untuk membantu mengingat (*aid to memory*) mengenai hal-hal yang pernah

dibicarakan antara menteri luar negeri suatu negara dengan duta besar negara lain.

- d. **Pro Memoire** yakni merupakan bentuk bukti tertulis resmi dari suatu percakapan pembicaraan yang dilakukan oleh menteri luar negeri suatu negara kepada duta besar atau kepala perwakilan diplomatik negara lain. Pro memoire sama dengan aide memoire, perbedaannya hanya terletak pada pro memoire lebih resmi, sedangkan aide memoire tidak resmi.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membedakan antara aide dan pro Memoire dengan nota verbal ? Aide dan pro memoire serta nota verbal sama-sama mencatat hasil percakapan atau ringkasan dari hasil percakapan baik secara resmi maupun tidak resmi perbedaan diantaranya terdapat pada siapa yang melakukan percakapan tersebut. Apabila aide memoire dan pro memoire merupakan ringkasan percakapan antara menteri luar negeri suatu negara dengan perwakilan diplomatik negara lain maka nota verbal merupakan ringkasan hasil percakapan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain. Disinilah letak perbedaan antara aide memoire, pro memoire dan juga nota verbal.

2. Model dalam Diplomasi

Dalam pelaksanaannya, praktik diplomasi tidak hanya bisa dilakukan secara tertulis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi praktik diplomasi juga dapat dilakukan secara langsung. Praktik diplomasi yang dilakukan secara langsung inilah yang paling banyak dan paling sering diterapkan oleh negara-negara di dunia. Adapun model dalam melakukan praktik diplomasi secara langsung antara lain

secara bilateral, multilateral, mediasi hingga memanfaatkan media komunikasi.

Diawal perkembangan praktik diplomasi, surat merupakan media komunikasi yang kerap kali digunakan sebagai media dalam berdiplomasi. Seiring perkembangan teknologi, telegram kemudian menjadi salah satu pilihan dalam penggunaan media komunikasi dalam berdiplomasi. Pasca perang dunia II, media komunikasi lainnya seperti fax, email, *telephone* hingga *video conference* turut dimanfaatkan sebagai media dalam berdiplomasi.

Diera globalisasi seperti saat ini yang turut mendukung perkembangan pesat media sosial, hal ini tidak luput dari perhatian para pemimpin negara. Tercatat saat ini sebanyak 173 pemimpin negara-negara didunia telah memiliki akun media sosial dan media sosial yang paling sering digunakan oleh para pemimpin negara-negara didunia adalah Twitter.

Penggunaan Twitter sebagai media diplomasi mulai berkembang ketika mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama secara aktif melakukan kampanye serta memberitakan kinerja dan pencapaian pemerintahannya. Selain Obama, sejumlah pemimpin negara dunia lainnya yang juga turut memanfaatkan Twitter sebagai media diplomasi adalah Presiden Amerika Serikat saat ini Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan juga Presiden Indonesia Joko Widodo.

Media komunikasi memegang peranan penting sebagai media dalam berdiplomasi, hal ini dikarenakan dibutuhkan persiapan yang matang dan panjang apabila para

pemimpin negara hendak bertemu namun dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada, para pemimpin negara tetap dapat melakukan praktik diplomasi tanpa harus melakukan persiapan yang matang dan panjang. Selain media sosial, media komunikasi yang kerap digunakan oleh para pemimpin negara dalam berdiplomasi adalah *telephone*, hingga dikenal istilah *telephone diplomacy*.

Telephone diplomacy dapat dilakukan baik dalam kondisi krisis (*crisis diplomacy*) maupun dalam kondisi normal (*routine diplomacy*). Melalui *telephone diplomacy*, para pemimpin negara mampu dengan segera membuat koreksi atas kesalahpahaman yang terjadi akibat dari suatu pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pihak. Selain itu, melalui *telephone diplomacy* juga para pemimpin negara bisa dengan segera memberikan respon kepada pihak lainnya terhadap suatu isu ataupun kejadian²³. *Telephone diplomacy* dalam kondisi normal kerap dilakukan ketika pemimpin suatu negara memberikan ucapan selamat kepada pemimpin negara lain yang baru saja terpilih untuk memimpin negaranya.

Dalam kondisi krisis, terdapat dua contoh penggunaan *telephone diplomacy*, yakni pada tanggal 20 July 1974, ketika Turki melakukan invasi ke Cyprus. Invasi yang dilakukan oleh Turki ini mengancam hubungan baik Turki dengan Yunani, akhirnya Inggris menjadi pihak ketiga sebagai penengah antara Yunani dan Turki. Proses negosiasi sendiri dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui telepon dengan pemerintah Yunani dan juga Turki secara bergantian.

²³ Berridge, G.R, 2005, *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 93

Inggris berperan sebagai pihak ketiga karena Cyprus adalah bagian dari negara *commonwealth* dan berdasarkan *treaty of guarantee* 1960, Inggris menjadi penjamin keamanan negara Cyprus²⁴.

Contoh lain yakni tahun 2014, saat krisis Ukraina sedang memanas, Putin menerima banyak sekali *telephone diplomacy* dari para pemimpin dunia yang memintanya untuk menurunkan tensi ketegangan di Ukraina. *Telephone diplomacy* datang, mulai dari *UN Secretary General* saat itu Ban Ki Moon, *Germany Chancellor* Angela Merkel hingga *US President* kala itu Barack Obama, melakukan *telephone diplomacy* kepada Putin guna meredam ketegangan pada krisis Ukraina.

Meskipun dalam praktiknya, *telephone diplomacy* dirasa lebih mudah apabila dibandingkan proses negosiasi namun bukan berarti *telephone diplomacy* tidak memiliki kesulitan dan kekurangan. Keterbatasan dalam *telephone diplomacy* antara lain, mempersiapkan sambungan *telephone* antar pemimpin negara ditengah kesibukan mereka dan ditambah perbedaan waktu antar negara. Selain itu, apabila dalam proses negosiasi, para pemimpin negara didampingi oleh Menteri Luar Negeri beserta Menteri-Menteri terkait sehingga para Menteri tersebut dapat memberikan masukan kepada pemimpin negara mereka. Maka berbeda dengan *telephone diplomacy*, dimana para pemimpin negara tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari para menterinya. Kedewasaan sikap para pemimpin negara pun diperlukan dalam praktik *telephone diplomacy*

²⁴ Ibid. Hlm. 94

terutama ketika diplomasi ini dilakukan dalam kondisi krisis²⁵.

Selain *telephone diplomacy*, salah satu model diplomasi lainnya adalah mediasi. Mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi yang dirancang untuk menyelesaikan konflik. Dalam mediasi, pihak yang memiliki peranan penting adalah pihak ketiga selaku mediator yang menjadi penengah dalam proses resolusi konflik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mediator dalam mediasi antara lain : negara, *private individual* ataupun *non government organization* (NGO).

Pihak ketiga dalam mediasi tidak harus *single party* tetapi bisa juga *multi party mediation*. Seperti yang terjadi pada krisis Kosovo 1999, ketika Jerman, Rusia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat menjadi mediator dalam konflik tersebut²⁶. Akan tetapi mediasi dengan melibatkan lebih dari satu pihak sebagai mediator sangatlah jarang terjadi, hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang terlibat sebagai mediator maka prinsip untuk menjadi mediator yang baik akan semakin sulit tercapai.

Guna menjadi mediator yang baik dan ideal, terdapat dua prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh sang mediator yakni netral dan imparisial. Netral berarti sang mediator tidak memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Imparsial berarti sang mediator tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Dua prinsip ini penting untuk

²⁵ Ibid. Hlm. 100

²⁶ Ibid. Hlm. 202

diterapkan oleh mediator apabila proses mediasi ingin berjalan lancar dan resolusi konflik dapat tercapai.

Proses mediasi dalam resolusi konflik tentunya bukanlah suatu proses yang dapat selesai hanya dalam satu malam. Proses mediasi resolusi konflik kerap kali membutuhkan proses yang cukup panjang. Sehingga mediator yang baik tidak hanya dituntut harus imparial dan netral tetapi juga harus memiliki “*creative formulas*”.

Dalam bab dua tentang *the art of negotiations*, mahasiswa telah dikenalkan tentang tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. Dalam tahapan *around the table*, terdapat tahapan formula, yaitu tahapan ketika suatu negara yang terlibat dalam proses negosiasi akan menyampaikan formula guna tercapainya kesepakatan dalam proses negosiasi tersebut.

Dalam proses mediasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan dalam proses negosiasi seperti yang telah dijabarkan dalam bab dua sebelumnya. Namun karena proses mediasi kerap kali membutuhkan proses yang panjang dan alot maka seorang mediator biasanya dituntut untuk memiliki banyak opsi formula guna menyelesaikan konflik. Inilah yang dimaksud dengan *creative formula*.

Terakhir, yang tidak kalah penting dari *creative formula* adalah perhatian secara berkelanjutan. Mediator yang ideal, hendaknya memiliki perhatian secara berkelanjutan terhadap konflik yang ia tengahi. Lagi-lagi, karena proses resolusi konflik yang memakan waktu yang panjang dan alot, tidak jarang mediator kehilangan minatnya

untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, seorang mediator dituntut untuk memiliki komitmen dan memberikan perhatian secara berkelanjutan demi terselesaikannya konflik.

Sikap Indonesia dalam konflik Israel dan Palestina menunjukkan komitmen yang besar dari Indonesia guna penyelesaian konflik tersebut. Meskipun Indonesia bukanlah mediator dalam konflik tersebut namun komitmen Indonesia serta perhatian yang terus diberikan oleh Indonesia kepada konflik Israel dan Palestina secara berkelanjutan dapat dijadikan contoh sikap mediator yang ideal.

Setelah *telephone diplomacy* dan mediasi, model diplomasi lainnya adalah diplomasi multilateral. **Diplomasi multilateral dilakukan dengan asumsi bahwa penting bagi negara-negara didunia untuk membangun aliansi dengan negara lain guna meningkatkan *balance of power*.** Seperti yang pernah dibahas dalam bab dua, bahwa dalam proses negosiasi meskipun pada prinsipnya negara-negara harus mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan *power* ataupun *bargaining position*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika dua negara yang apabila diukur secara *power* atau *bargaining position* yang tidak setara melakukan negosiasi maka proses negosiasi diantara kedua negara tersebut akan didominasi oleh negara dengan *power* dan *bargaining position* yang lebih besar dibanding negara dengan *power* dan *bargaining position* yang lebih kecil. Namun apabila negara-negara yang memiliki *power* yang lebih kecil bergabung dan membangun aliansi dengan negara lain yang juga memiliki *power* yang lebih kecil maka *bargaining position* mereka akan menjadi lebih besar

begitupula dengan *power* yang dimiliki negara-negara tersebut.

Selain untuk meningkatkan *balance of power*, diplomasi multilateral juga memiliki potensi berhasilnya proses negosiasi yang lebih besar dibandingkan dengan model diplomasi lainnya. Hal ini dikarenakan negara-negara yang melakukan proses diplomasi multilateral lebih mengutamakan pencapaian kepentingan bersama dibandingkan *power* ataupun *bargaining position*. Melalui diplomasi multilateral, kesepakatan yang telah dicapai diantara negara-negara yang terlibat juga dapat bertahan lebih lama. Prosedur dalam diplomasi multilateral tidak terlalu jauh berbeda dengan proses pra-negosiasi seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, yang membedakan hanyalah, dalam diplomasi multilateral perlu diatur pula proses pengambilan keputusan apakah melalui veto, melalui suara terbanyak atau melalui konsesus²⁷.

Model terakhir dalam praktik diplomasi adalah diplomasi bilateral. Ketika berbicara tentang diplomasi bilateral, mahasiswa mungkin akan mengingat kembali pembahasan dalam bab dua tentang proses negosiasi. Serupa diplomasi multilateral maka diplomasi bilateral juga dilakukan secara tatap muka melalui perundingan di atas meja. Bedanya hanyalah, apabila diplomasi multilateral melibatkan lebih dari dua negara, maka diplomasi bilateral melibatkan hanya dua negara saja.

Perlu dipahami bahwa diplomasi bilateral sendiri terbagi menjadi dua tipe yakni diplomasi bilateral

²⁷ Ibid. Hlm. 166

conventional dan juga diplomasi bilateral *unconventional*. Diplomasi bilateral *conventional* dan *unconventional* disini, lebih dari sekedar pertemuan antara dua negara dalam suatu proses negosiasi akan tetapi bagaimana dua negara menjalin dan menjaga hubungan baik melalui misi-misi diplomatik.

Diplomasi bilateral *conventional* adalah hubungan antara dua negara yang dilakukan dalam misi resmi dan juga formal. Diplomasi bilateral *conventional*, dilakukan dengan menempatkan perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara pengirim kepada negara penerima yang telah dijelaskan secara mendalam dalam bab tiga.

Sementara diplomasi bilateral *unconventional* adalah kondisi ketika diplomasi bilateral konvensional tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan negara terlibat dalam konflik dan menarik perwakilan diplomatiknya hingga berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Dalam kondisi ini, bukan berarti negara tidak dapat melakukan praktik diplomasi sama sekali. Dalam kondisi ini, diplomasi bilateral *unconventional* dibutuhkan dan diterapkan.

Diplomasi bilateral konvensional dilakukan ketika dua negara berada dalam kondisi hubungan yang damai. Adapun unsur-unsur penting dalam proses diplomasi bilateral konvensional banyak dipengaruhi oleh Sistem Negara Perancis atau *French System*, antara lain:

- a. *Resident Embassy* seperti yang telah dijelaskan dalam bab 3 sebelumnya
- b. *Secret Diplomacy* artinya seorang diplomat harus mampu menjaga rahasia dalam hubungan bilateral suatu negara. Mereka harus mampu menjaga

kerahasiaan dari isi negosiasi hingga isi perjanjian dari negosiasi tersebut.

- c. *Protocol* artinya seorang diplomat harus taat pada protokol dalam melaksanakan diplomasi
- d. *Professionalism* artinya seorang diplomat yang ditempatkan dinegara penerima, harus melewati sejumlah tahapan tes dan training, serta *Adoption of anti-deceit diplomacy* atau dikenal juga sebagai diplomasi yang jujur.

Selain berdasarkan *French System* diatas, unsur penting dalam diplomasi bilateral konvensional lainnya juga diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation tahun 1961. Di dalamnya mengatur tentang kekebalan diplomatik dan juga misi diplomatik seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3 terdahulu²⁸.

Sementara diplomasi bilateral *unconventional* dilakukan ketika negara berada dalam kondisi konflik dengan negara lain. **Diplomasi bilateral unconventional sendiri dapat dilakukan melalui empat metode yakni interest section, front mission, representative office, consular post and section.**

- a. **Interest section adalah kondisi sekelompok diplomat dari satu negara bekerja dibawah bendera negara lain dalam wilayah negara ketiga.** Contohnya adalah yang dilakukan oleh diplomat Iraq yang bekerja di kedutaan besar Jordania di Inggris. Hal ini biasa dilakukan apabila hubungan diplomatik kedua negara telah putus dan *interest section*

²⁸ Ibid. Hlm. 108

diterapkan sebagai tahap pertama dalam perbaikan hubungan kedua negara. Negara dengan *interest section* memiliki staf yang terbatas serta akses terhadap informasi yang juga terbatas²⁹.

- b. *Consular post & section*. **memiliki kesamaan dengan interest section namun bedanya dalam consular post & section mereka tidak melibatkan pihak ketiga.** Contohnya adalah yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang membuka *consular post & section* di Hanoi, Vietnam pada masa perang Vietnam. Pada saat itu *consular post & section* Inggris sesungguhnya digunakan sebagai alat untuk meraih informasi penting bagi Amerika yang kala itu terlibat perang dengan Vietnam. *Consular post & section* juga memiliki staf yang terbatas serta akses terhadap informasi yang terbatas, sama seperti *Interest Section*³⁰.
- c. *Representative office* tidak memiliki staf yang terbatas maupun akses terhadap informasi yang terbatas. **Representative office bekerja dan beroperasi layaknya kedutaan besar hanya berbeda nama saja.** Para staffnya juga memiliki kekebalan diplomatik dan ketua dari *representative office* diperlakukan layaknya duta besar³¹.
- d. **Front missions dibentuk untuk suatu misi tertentu namun sesungguhnya hanya sebagai kedok untuk menutupi kepentingan diplomatik dari negara pengirim.** *Front missions* biasanya dibentuk dalam

²⁹ Ibid. Hlm. 138

³⁰ Ibid. Hlm. 143

³¹ Ibid. Hlm. 145

misi-misi seperti misi perdagangan ataupun misi pariwisata. Contohnya adalah ketika Vietnam menempatkan *Front missions*-nya di Inggris pada era Perang Vietnam.³²

Berdasarkan penjelasan tentang diplomasi bilateral *unconventional* dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam kondisi konflik, setiap negara tidak dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri, sehingga peran ataupun hubungan baik dengan negara lain sangatlah diperlukan. Ketika negara terlibat konflik dengan negara lain, secara otomatis *level of trust* diantara negara tersebut menjadi berkurang. Guna mengembalikan *level of trust* tersebut, sebagai langkah awal negara dapat melakukan diplomasi bilateral *unconventional*. Hal ini pulalah yang menjadi dasar lahirnya model diplomasi bilateral *unconventional*.

3. Metode Diplomasi

Diplomasi dilakukan oleh suatu negara guna mencapai kepentingan nasionalnya. Pada awal perkembangannya, diplomasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *hard power* seperti kekuatan militer. Pada masa Perang Dunia, isu yang menjadi perhatian dunia internasional adalah isu keamanan dan juga politik, negara-negara didunia pada saat itu pun kerap kali menerapkan pendekatan *hard power* dan mengutamakan *hard diplomacy* dalam memenuhi atau mencapai kepentingan nasionalnya. Namun, dengan berakhirnya Perang Dunia dan semakin berkembangnya dunia internasional yang ditandai dengan berkembangnya aktor-aktor dalam hubungan

³² Ibid. Hlm. 146

internasional, pendekatan *hard power* dalam diplomasi memang belum sepenuhnya ditinggalkan namun juga tidak menjadi pilihan utama dalam metode berdiplomasi.

Perkembangan dunia internasional, tidak hanya ditandai dengan berkembangnya aktor dalam hubungan internasional tetapi juga berkembangnya isu dalam hubungan internasional. Jika dahulu, isu dalam hubungan internasional berfokus pada isu keamanan, politik dan ekonomi, maka kini isu-isu seperti isu sosial budaya, isu lingkungan hingga isu kemanusiaan turut mewarnai ragam isu yang menjadi perhatian, tidak hanya negara tetapi juga masyarakat internasional.

Dengan semakin berkembangnya isu dalam hubungan internasional maka metode dalam berdiplomasi pun tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan *hard power* tetapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan *soft power*. *Soft diplomacy* adalah metode diplomasi yang menggunakan pendekatan *soft power* yakni guna mencapai kepentingan nasionalnya maka suatu negara menggunakan pendekatan non militer seperti pendekatan sosial ataupun pendekatan budaya. *Soft diplomacy* yang dilakukan oleh negara-negara didunia biasanya dikenal dengan nama-nama yang unik. Nama-nama yang unik ini berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam metode diplomasi itu sendiri. Saya akan memberikan tiga contoh *soft diplomacy* yang dilakukan oleh negara-negara didunia yang memberikan pengaruh yang signifikan bagi kondisi dunia internasional, yakni antara lain: *Ping Pong Diplomacy*, *Panda Diplomacy* dan juga *Kpop Diplomacy*.

Ping Pong Diplomacy, terjadi pada konteks Perang Dingin tahun 1971 ketika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok berada dalam level rendah dan pertentangan ideologi. Ketika itu terjadi pertandingan tenis meja atau ping pong antara atlet ping pong Amerika Serikat melawan atlet ping pong asal Tiongkok. Setelah pertandingan tersebut berakhir, Tiongkok memutuskan untuk mengundang tim ping pong Amerika Serikat untuk datang ke negaranya dan melakukan pertandingan persahabatan. Pertandingan tersebut akhirnya berujung pada kunjungan Presiden Amerika Serikat kala itu Richard Nixon ke Tiongkok pada tahun 1972. Kunjungan Nixon ini berlanjut dengan mulai cairnya hubungan diplomatik yang baik diantara kedua negara, yang turut menandai berakhirnya isolasi Tiongkok dari dunia internasional³³. Kunjungan Nixon tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Nixon Shock”.

Panda Diplomacy, merupakan suatu proses *soft diplomacy* yang cukup panjang, yang sudah mulai dilakukan oleh Tiongkok sejak tahun 1957. Pemerintah Tiongkok pada saat itu memberikan hadiah binatang panda pada sejumlah tokoh negara-negara didunia. Tercatat tahun 1972, ketika melakukan *ping pong diplomacy*, Richard Nixon menerima hadiah dua ekor panda dari pemerintah Tiongkok.

Tahun 2007, keluarga kerajaan Spanyol juga menerima hadiah dua ekor panda dari pemerintah Tiongkok, mantan Gubernur Jendral Australia, Quentin Bryce tahun 2009 juga menerima hadiah dua ekor panda dari pemerintah

³³ Ping Pong Diplomacy diakses melalui <https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy> pada tanggal 12 Juli 2019

Tiongkok, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak tahun 2014, Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye tahun 2016, Kanselir Jerman, Angela Merkel tahun 2017 hingga Presiden Indonesia, Joko Widodo tahun 2017 turut mendapatkan hadiah binatang panda dari pemerintah Tiongkok³⁴.

Diplomasi Panda ini dilakukan oleh Tiongkok dengan misi untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara didunia serta untuk merubah citra negara Tiongkok, yang dikenal dengan sistem negara komunisnya dengan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dinegaranya. Selain untuk menjalin hubungan baik dan merubah citra, Diplomasi Panda juga memberikan keuntungan bagi Tiongkok, yakni melalui pemberian sepasang panda kepada para tokoh negara-negara didunia, pemerintah Tiongkok secara tidak langsung terbantuan dalam proses konservasi panda yang dahulu sempat masuk dalam daftar hewan terancam punah. Keberhasilan proses konservasi ini membuat panda saat ini berhasil keluar dari daftar hewan terancam punah.

K-pop Diplomacy. Korea Selatan adalah negara yang terkenal dengan budaya pop mereka yang mendunia yakni K-pop atau Korean pop. Banyak pengamat hubungan internasional yang mengatakan bahwa K-pop adalah salah satu alat atau metode diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan guna mempopulerkan produk hingga wisata negaranya.

³⁴ China's Panda Diplomacy diakses melalui <https://thediplomat.com/2017/11/chinas-panda-diplomacy/> pada tanggal 12 Juli 2019

Namun K-pop sebagai metode diplomasi memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara ditahun 2018. Pasca Perang Korea ditahun 1953, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara selalu diwarnai ketegangan, berbagai upaya guna menurunkan friksi diantara keduanya selalu berujung kegagalan.

Awal tahun 2018 merupakan pengecualian, ketika pemerintah Korea Selatan mengirimkan sejumlah idol K-pop untuk berangkat ke Korea Utara dan menghibur masyarakat serta pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Konser para idol Korea Selatan ini kemudian berujung pada pertemuan antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae In dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Kedua pemimpin negara Korea itu bertemu dan berjabat tangan diwilayah *demilitarize zone* atau zona netral yang dikosongkan dari pasukan militer³⁵.

Simpulan

Ada berbagai model dan metode dalam melakukan praktik diplomasi. Diplomasi tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka tetapi juga bisa melalui korespondensi. Selain itu, model dalam melakukan praktik diplomasi juga turut memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pemimpin dunia yang memiliki dan memanfaatkan media sosial sebagai media dalam berdiplomasi meskipun model diplomasi lainnya seperti diplomasi multilateral, bilateral hingga mediasi juga tetap menjadi pilihan bagi negara-negara didunia. Selain itu,

³⁵ When Kpop Meets Diplomacy diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/life/2018/07/01/when-k-pop-meets-diplomacy-5-key-moments.html> pada tanggal 12 Juli 2019

perkembangan dalam dunia internasional turut berpengaruh terhadap metode dalam praktik diplomasi. Diplomasi kini lebih banyak dilakukan dengan mengedepankan pendekatan *soft power* seperti pendekatan sosial dan budaya dibandingkan pendekatan *hard power* yakni dengan menggunakan kekuatan militer. Pendekatan *soft diplomacy* dilakukan oleh negara-negara didunia guna mengantisipasi ketegangan yang mungkin terjadi serta menciptakan harmonisasi perdamaian dunia.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Sebutkan dan jelaskan perbedaan tiap-tiap jenis nota!
- 1.2 Sebutkan dan jelaskan bentuk diplomasi unconventional !
- 1.3 Carilah contoh diplomasi *soft power* yang dilakukan oleh negara-negara didunia yang turut memberikan perubahan signifikan bagi dunia internasional !

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait model dan metode dalam berdiplomasi, dimulai dari korespondensi diplomatik, diplomasi bilateral, multilateral hingga diplomasi yang memanfaatkan media komunikasi serta metode dalam berdiplomasi terutama yang menggunakan pendekatan *soft power*. Fasilitator akan

memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

G.R Berridge. 2005. *Diplomacy Theory and Practice (Third Edition)*, Palgrave MacMillan, New York.

China's Panda Diplomacy diakses melalui <https://thediplomat.com/2017/11/chinas-panda-diplomacy/>

Ping Pong Diplomacy diakses melalui <https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy>

When Kpop Meets Diplomacy diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/life/2018/07/01/when-k-pop-meets-diplomacy-5-key-moments.html>

BAB 5

PUBLIC DIPLOMACY, CULTURAL DIPLOMACY AND GASTRODIPLOMACY

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan tentang berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi serta memahami perbedaan diantara masing-masing model diplomasi tersebut.

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi serta perbedaan diantara masing-masing model diplomasi tersebut sehingga akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok

bahasan selanjutnya tentang instrumen *soft power diplomacy* lainnya yakni diplomasi lingkungan dan juga diplomasi kemanusiaan.

4. Manfaat Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu mengetahui dan menganalisa berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui perbedaan diantara diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Perkembangan di era globalisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan situasi dalam Hubungan Internasional. Perkembangan ini, tidak hanya terkait aktor-aktor dalam Hubungan Internasional tetapi juga isu. Apabila dahulu, hubungan internasional didominasi oleh isu perang dan damai, maka kini, semakin banyak bermunculan isu-isu lain seperti isu lingkungan, pariwisata, sosial budaya, hingga kemanusiaan.

Perkembangan isu dalam hubungan internasional inilah yang kemudian berperan dalam pergeseran gaya berdiplomasi. Diplomasi saat ini tidak lagi identik dengan pertemuan formal diantara dua negara atau lebih guna membicarakan isu-isu seperti isu politik, ekonomi dan keamanan. Melalui *soft power diplomacy*, isu-isu seperti isu lingkungan, sosial budaya hingga kemanusiaan turut mendapatkan perhatian dalam praktik diplomasi.

Dalam bab 4 sebelumnya, telah dibahas mengenai beberapa contoh praktik *soft power diplomacy*, mulai dari *Ping Pong Diplomacy*, *Panda Diplomacy* hingga *K-pop diplomacy*. Berdasarkan pembahasan di bab 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *soft power diplomacy* sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, karena *Ping Pong Diplomacy* saja telah diterapkan pada tahun 1971 namun perbedaan *soft power diplomacy* di era tersebut dengan era globalisasi saat ini adalah di era globalisasi seperti saat ini, *soft power diplomacy* lebih sering digunakan oleh negara-negara di dunia dibandingkan *hard power diplomacy*. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan kondisi pada saat era Perang Dingin, meskipun *soft power diplomacy* telah diterapkan tetapi *hard power diplomacy* juga masih mendominasi.

Dominasi dari *soft power diplomacy* dapat dilihat dari berbagai istilah diplomasi yang menyesuaikan dengan isu yang menjadi fokus dari pelaksanaan praktik diplomasi tersebut seperti diplomasi publik, diplomasi budaya, gastro diplomasi serta diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan yang akan dibahas pada bab terakhir dari buku ajar ini. Pada bab ini, mahasiswa akan diajak mengenal lebih

dalam tentang diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga gastro diplomasi. Mahasiswa juga diberikan ilustrasi penerapan praktik diplomasi tersebut dengan harapan, ilustrasi tersebut dapat membantu mahasiswa untuk menganalisa praktik diplomasi publik, diplomasi budaya dan gastro diplomasi itu sendiri.

1. Diplomasi Publik (*Public Diplomacy*)

Diplomasi publik adalah salah satu instrumen penting dalam *soft power* yang telah diterapkan oleh negara-negara didunia jauh sebelum diplomasi publik mendapatkan perhatian dan diterapkan oleh hampir seluruh negara-negara. Beberapa akademisi Hubungan Internasional seperti Jan Mellisen bahkan mengatakan bahwa Amerika Serikat, Uni Soviet dan juga negara-negara Eropa adalah pihak-pihak yang telah terlebih dahulu menerapkan diplomasi publik pada era Perang Dingin.

Namun apabila kita berbicara tentang Perang Dingin, akan ada banyak pihak yang mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut pada era Perang Dingin lebih tepat disebut sebagai propaganda dan bukannya diplomasi publik. Lalu adakah perbedaan antara propaganda dan diplomasi publik ? sebelum mengetahui jawabannya, mahasiswa terlebih dahulu harus memahami definisi dari diplomasi publik itu sendiri.

Secara umum, diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (*foreign public*). **Jan Mellisen, mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau**

organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara³⁶. Sementara Jay Wang, melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat³⁷.

Diplomasi publik didefinisikan pula sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing and influencing foreign audiences*. Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain. Berdasarkan semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa **diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri melalui cara-cara yang positif guna mengubah cara pandang publik mancanegara terhadap suatu negara.**

Setelah mahasiswa memahami definisi dari diplomasi publik dan sebelum kita kembali pada pertanyaan apa perbedaan antara diplomasi publik dengan propaganda, terlebih dahulu kita akan memahami definisi dari propaganda itu sendiri. Propaganda adalah sebuah upaya yang disengaja dan sistematis dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain

³⁶ Mellisen, Jan. 2005. *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations*. New York, Palgrave MacMillan

³⁷ Public Diplomacy diakses melalui www.uscpublicdiplomacy.org pada tanggal 9 agustus 2019

guna menganut suatu aliran atau merubah sikap dan tindakan orang lain terhadap sesuatu hal³⁸.

Dapat disimpulkan bahwa propaganda memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan perspektif seseorang terhadap suatu hal sementara diplomasi publik memiliki tujuan untuk merubah cara pandang publik mancanegara terhadap suatu negara atau dengan kata lain untuk merubah *image* atau citra yang dimiliki suatu negara, dari yang awalnya bercitra negatif dimata publik menjadi citra positif.

Banyak pihak yang melihat bahwa diplomasi publik sama dengan propaganda. Namun, diplomasi publik pada hakikatnya mencakup hal-hal yang lebih luas dan lebih substantif. Hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan diplomasi publik adalah sasaran yang dituju dari praktik diplomasi ini adalah *people* bukan *government*, karena diplomasi publik bertujuan untuk merubah citra suatu negara dimata publik internasional.

Adapun aktor yang dapat melakukan praktik diplomasi publik adalah pemerintah suatu negara maupun kelompok masyarakat dari suatu negara. Sementara tema dan isu dalam diplomasi publik, lebih kearah sikap dan perilaku publik. Diplomasi publik juga lebih transparan dan berjangkauan luas, hal inilah yang membedakan diplomasi publik dengan diplomasi konvensional. Diplomasi konvensional memfokuskan tema dan isu pada perilaku dan kebijakan pemerintah, selain itu diplomasi konvensional juga cenderung tertutup dan berjangkauan terbatas.

³⁸ Pengertian propaganda diakses melalui <https://kbbi.web.id/propaganda> pada tanggal 9 agustus 2018

Diplomasi publik mulai populer dan kerap digunakan oleh negara-negara didunia pada era globalisasi. Berdasarkan sejarahnya, Perancis merupakan negara pertama yang menerapkan diplomasi publik atau pada era tersebut lebih dikenal sebagai *politique d'influence* dengan sasaran pada publik luar negeri guna pemulihan citra setelah kekalahannya pada dua Perang Dunia.

Pada perkembangan selanjutnya, Belanda juga turut menerapkan diplomasi publik atau yang lebih dikenal di Belanda sebagai *publieks diplomatie avant-la-lettre* dalam mengusung isu-isu moral jauh sebelum Perang Dingin berakhir. Penyebutan diplomasi publik sendiri muncul pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University dalam penelitiannya mengenai program-program internasional dan budaya Amerika Serikat.

Mark Leonard mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik, yakni³⁹:

1. Meningkatkan rasa kekeluargaan dengan negara lain, dengan cara memiliki citra yang baik terhadap satu negara
2. Meningkatkan penghargaan masyarakat kepada negara tertentu, seperti mempunyai persepsi yang positif

³⁹ Leonard, Mark. 2002. *Public Diplomacy*. London. The Foreign Policy Centre. Hlm. 9

3. Mengeratkan hubungan dengan masyarakat di satu negara, contohnya dengan cara pendidikan ke dalam kerja sama ilmiah, meyakinkan masyarakat di satu negara untuk mendatangi tempat – tempat wisata, menjadi konsumen produk buatan lokal, pemberi pengetahuan mengenai nilai – nilai yang dijunjung oleh aktor
4. Memengaruhi masyarakat di negara lain untuk berinvestasi, dan menjadi partner dalam hubungan politik

Diplomasi publik dapat pula digunakan untuk mengatasi konflik, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak yang berkonflik. Sehingga diplomasi publik menjadi sarana yang ideal guna membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah.

Terdapat beberapa alasan mengapa diplomasi publik harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan praktik diplomasi antar negara, yaitu:

1. Diplomasi publik memiliki efek jangka panjang terhadap tujuan-tujuan politik luar negeri.
2. Diplomasi publik dapat meningkatkan ekspor suatu negara dan investasi asing. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara berkembang.
3. Diplomasi publik dapat membantu menunjukkan eksistensi bagi negara -negara yang memiliki *power* lemah di tataran dunia.

4. Diplomasi publik dapat membantu beberapa negara untuk mengartikulasi identitas nasionalnya.
5. Diplomasi publik merupakan bentuk komitmen suatu negara atas situasi dunia yang stabil dan tata dunia multilateral yang damai.
6. Diplomasi publik dapat membantu dalam mereduksi streotipe yang salah atas suatu negara.
7. Diplomasi publik juga dapat digunakan sebagai bentuk *counter* atas pemberitaan negatif suatu negara akibat krisis domestik yang menimpanya.

Selanjutnya, penulis akan memberikan dua contoh budaya populer atau *pop culture* dari dua negara yang kerap kali dianggap sebagai bentuk diplomasi publik, yakni Japan Pop Culture yang dikenal juga sebagai Cool Japan serta Korean Wave.

Setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang berusaha untuk kembali menata perekonomian negaranya yang hancur sebagai dampak dari perang. Selain berusaha untuk menata perekonomiannya, Jepang juga berusaha untuk merubah citra negaranya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang dikenal sebagai negara yang kejam, hal ini tidak terlepas dari sikap dan perilaku para prajurit Jepang saat Perang Dunia II. Jepang kemudian memanfaatkan budaya populer negaranya, seperti Manga, Anime hingga J-Pop atau Japan Pop, untuk mengubah citra negara Jepang, yang tadinya dianggap sebagai negara yang kejam menjadi negara yang ramah dan bersahabat.

Jika kita menilik kembali definisi serta tujuan dari diplomasi publik, yang menyasar masyarakat mancanegara guna mengubah citra atau pandangan mereka terhadap suatu negara, maka, apa yang dilakukan Jepang melalui budaya populernya dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh pelaksanaan diplomasi publik. Diplomasi publik yang dilakukan Jepang melalui program Cool Japan, terbukti berhasil mengubah citra negara Jepang. Bahkan dewasa ini beberapa budaya populer Jepang telah menjadi identitas nasional negara Jepang yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepang.

Langkah Jepang dalam memopulerkan budaya populernya, diikuti oleh Korea Selatan. Tahun 2000-an, Korea Selatan secara perlahan namun pasti memulai upayanya guna memopulerkan budaya pop mereka melalui K-Drama hingga K-Pop atau Korean Pop. Budaya pop Korea Selatan, kemudian berhasil menyamai popularitas budaya pop Jepang, hingga dikenal sebagai Korean Wave. Namun apakah Korean Wave termasuk dalam contoh pelaksanaan diplomasi publik, layaknya Cool Japan ? Di sinilah hal yang menarik untuk dianalisa dan dibahas, banyak pihak yang mengatakan bahwa Korean Wave dan Cool Japan adalah sama. Sama-sama budaya pop suatu negara yang kemudian populer hampir keseluruh dunia, karena keduanya sama-sama budaya pop, maka keduanya juga sama-sama bentuk diplomasi publik.

Namun, jika dianalisa lebih dalam, budaya pop Korea Selatan tidak memiliki tujuan maupun sasaran yang sama dengan budaya pop Jepang. Jangan lupa bahwa budaya pop Jepang, digunakan sebagai alat untuk mengubah citra

negara tersebut pasca Perang Dunia II sementara budaya pop Korea Selatan, tidak digunakan untuk mengubah citra apapun.

Budaya pop Korea Selatan digunakan oleh pemerintah Korea Selatan guna mempopulerkan negaranya dan menarik wisatawan untuk datang ke negaranya. Bahkan salah seorang akademisi asal Korea Selatan pernah mengatakan bahwa budaya pop Korea Selatan itu bukanlah bentuk diplomasi melainkan murni bisnis. Berdasarkan tujuan maupun sasarannya, budaya pop Korea Selatan kurang tepat jika dikategorikan sebagai diplomasi publik layaknya budaya pop Jepang.

Selain Jepang, Indonesia sebagai negara yang terkenal akan keragaman budaya, etnis dan agamanya juga memanfaatkan diplomasi publik guna mengubah citra negara. Pasca maraknya aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang terjadi di Indonesia, menyebabkan munculnya sentimen negatif terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menerapkan diplomasi publik guna mengubah sentimen negatif tersebut.

Diplomasi publik ini dilakukan melalui Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) dan Future Faith Leaders. Ini merupakan upaya kebijakan diplomasi publik pemerintah Indonesia dalam mempromosikan keberagaman budaya dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia kepada publik internasional⁴⁰.

⁴⁰ Diplomasi Publik Indonesia diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.org/> pada tanggal 9 agustus 2019

Melalui program beasiswa Future Faith Leaders, Indonesia mampu mengubah persepsi negatif masyarakat internasional terkait keharmonisan umat beragama di Indonesia dan menciptakan citra positif akan keragaman umat beragama dan berbudaya di Indonesia yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung ke Indonesia.

Setelah memahami definisi serta tujuan dari diplomasi publik, yang dibantu pula dengan ilustrasi contoh kasus, harapannya mahasiswa Hubungan Internasional dapat lebih kritis lagi membedakan contoh kasus yang termasuk dalam kategori diplomasi publik dan juga contoh kasus yang kurang tepat disebut sebagai diplomasi publik.

2. Diplomasi Budaya (*Cultural Diplomacy*)

Selain diplomasi publik, salah satu instrumen *soft power* lainnya adalah diplomasi budaya. Diplomasi budaya adalah sebuah praktik diplomasi yang menggunakan budaya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Melalui diplomasi budaya, suatu negara dapat memperkenalkan budaya negaranya kepada dunia dan menarik wisatawan asing untuk datang berkunjung kenegaranya. Selain itu, diplomasi budaya juga dapat digunakan dalam praktik diplomasi bilateral maupun multilateral sebagai instrumen untuk mencairkan suasana dalam praktik diplomasi tersebut.

Secara harfiah, diplomasi budaya dapat dikatakan sebagai suatu formula kebijakan luar negeri suatu negara yang menekankan kepada pengenalan budaya yang dimiliki oleh negara tersebut kepada negara sahabat maupun

masyarakat internasional guna mendukung tercapainya kepentingan nasional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan sesuai dengan namanya, diplomasi budaya menggunakan budaya sebagai instrumen pelaksanaannya. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu negara dimanfaatkan sebagai manifestasi dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Layaknya diplomasi *soft power* lainnya, diplomasi budaya juga menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi yang menekankan kepada *hard power*.

Terdapat beberapa kekuatan utama dari diplomasi budaya, yakni⁴¹:

- a. Diplomasi budaya adalah koneksi dua arah, bukan paksaan salah satu pihak atau unilateral. Sehingga, diplomasi budaya memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya
- b. Diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman diantara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya
- c. Diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada saat keadaan hubungan diplomasi sedang tidak harmonis. Oleh karenanya, diplomasi budaya dapat

⁴¹ Van Kim Hoang Ha. *Peran Diplomasi Budaya dalam Mewujudkan Komunitas Sosial Budaya ASEAN: Studi Kasus Vietnam*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. X No. 1. 2016

bertindak sebagai salah satu solusi yang efektif ketika muncul friksi ataupun konflik.

Diplomasi budaya sesungguhnya bukanlah hal baru dalam praktik diplomasi antar negara-negara didunia. Diplomasi budaya telah diterapkan oleh negara-negara didunia jauh sebelum era globalisasi yang kemudian memberikan pengaruh terhadap perkembangan aktor dan isu dalam hubungan internasional. Sebelum Perang Dunia I, sebagian besar praktik diplomasi budaya dilakukan secara informal. Hal ini kemudian berubah ketika Perang Dunia I telah berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Westphalia, ketika negara-negara di seluruh dunia kemudian mengadopsi diplomasi budaya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.

The All Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries atau yang lebih dikenal sebagai VOKS, menjadi alat bagi pemerintah Uni Soviet kala itu untuk berelasi dengan kelompok-kelompok budaya pro soviet. Perancis pada tahun 1883, membentuk Alliance France yang digunakan untuk menekankan pentingnya bahasa untuk menghubungkan Perancis dengan dunia internasional. Italia kemudian mendirikan Dante Aligheri Society pada tahun 1889, untuk mempromosikan kebudayaan Italia. Sementara itu, Jerman mendirikan Goethe Institute dan pemerintah Inggris mendirikan British Council guna mempromosikan kebudayaan masing-masing negara.

Tren serupa juga menyebar ke Asia. Tiongkok menggunakan diplomasi budaya guna mengurangi ketegangan hubungan diplomatik dengan Jepang. Jepang pun tidak ketinggalan juga melaksanakan diplomasi budaya

sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, yakni melalui Japan Foundation dan International House of Japan⁴².

Ragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia juga turut menerapkan diplomasi budaya dalam kebijakan luar negerinya salah satunya melalui Rumah Budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia merupakan sebuah pusat budaya Indonesia di luar negeri yang telah didirikan sejak tahun 2012. Rumah Budaya Indonesia memiliki tiga fungsi yakni ekspresi budaya, pembelajaran budaya, dan promosi budaya. Keberadaan Rumah Budaya Indonesia menjadi platform guna membantu pemerintah Indonesia dalam menyinergikan diplomasi budaya. Sejak tahun 2017, tercatat ada 19 Rumah Budaya Indonesia yang tersebar di beberapa negara, sehingga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdapat Atase Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki Rumah Budaya Indonesia⁴³.

Selain melalui Rumah Budaya Indonesia, para duta besar yang dikirim oleh Indonesia sebagai perwakilan negara dinegara sahabat juga mengemban misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada pemerintah hingga masyarakat negara sahabat. Salah satu contoh adalah

⁴² *What are We Searching for A Cultural Diplomacy* oleh Jessica C. E Gienow-Hecht dan Mark C. Donfried dikutip melalui Yulius Purwadi Hermawan Ph.D dan Ratih Indraswari MA. Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara. Hlm. 5

⁴³ Mengembangkan diplomasi budaya Indonesia dengan mencontoh model negara sahabat diakses melalui <https://kumparan.com/alex-rudini-sulaiman/mengembangkan-diplomasi-budaya-indonesia-dengan-mencontoh-model-negara-sahabat> pada tanggal 9 Agustus 2019

seperti yang dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya.

Tantowi Yahya mengaku diamanatkan misi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menempatkan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Pasifik. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia kerap kali dianggap sebagai negara Asia dibandingkan negara Pasifik. Padahal secara geografis, tiga provinsi ditimur Indonesia yakni Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur terletak di Pasifik.

Tantowi kemudian menggelar pentas budaya yang diberi tajuk “The Symphony of Friendship” pada tahun 2017. Dalam pentas budaya tersebut, musik dan budaya asal Indonesia Timur dipertunjukkan kepada masyarakat Selandia Baru. Musik dan budaya Indonesia Timur ini memiliki kesamaan dengan musik dan budaya asal kepulauan Solomon dan juga Maori⁴⁴.

Berdasarkan ilustrasi diatas, apa yang dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru adalah bentuk pemanfaatan diplomasi budaya demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Tantowi Yahya, memanfaatkan budaya Indonesia Timur sebagai alat untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara Asia tetapi juga dapat dikategorikan sebagai negara Pasifik, dilihat berdasarkan letak geografis dan juga kesamaan budaya.

⁴⁴ Diplomasi Budaya ala Tantowi Yahya diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4295452/diplomasi-budaya-ala-tantowi-yahya> pada tanggal 12 Agustus 2019

Melalui diplomasi budaya tersebut, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru membangun dan meningkatkan hubungan diplomasi berdasarkan asas solidaritas sebagai sesama negara Pasifik. Melalui rasa solidaritas ini, kedua negara akan semakin meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi dan politik. Inilah yang menjadi tujuan dari diplomasi budaya itu sendiri, pemanfaatan budaya guna tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Indonesia memanfaatkan budayanya guna mempererat dan meningkatkan rasa solidaritasnya dengan Selandia Baru guna terjalinnya kerjasama yang lebih erat dibidang ekonomi dan juga politik.

Keberhasilan diplomasi budaya suatu negara ditentukan oleh bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut dalam menjalankan diplomasi budayanya. Pemerintah Indonesia sendiri masih perlu meningkatkan diplomasi budaya yang dilakukan guna merangsang minat dan rasa ingin tahu masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia.

Pemerintah suatu negara dapat menerapkan model kerjasama dan koordinasi antara kementerian luar negeri sebagai pelaksana diplomasi dan promosi budaya dengan kementerian kebudayaan sebagai penyedia konten, model ini dikenal juga sebagai Model Perancis. Selain Model Perancis, terdapat pula Model Tiongkok, yaitu pemerintah suatu negara dapat membentuk suatu lembaga yang independen yang memiliki fungsi untuk menentukan strategi diplomasi budaya. Terakhir adalah Model Korea Selatan, yaitu penyebaran budaya Korea Selatan diluar negeri dilakukan oleh lembaga pemerintah namun Korea Selatan juga membentuk suatu badan khusus yang akan menentukan arah

kebijakan diplomasi budaya Korea Selatan serta menggunakan media massa dalam membantu proses penyebaran budayanya. Ketiga model tersebut dapat dicontoh dan diterapkan oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia guna meraih kesuksesan dalam pelaksanaan diplomasi budaya⁴⁵.

3. Diplomasi Gastro (*Gastro Diplomacy*)

“The gentle art of gastronomy is a friendly one. It hurdles the language barrier, makes friends among civilized people, and warms the heart.”⁴⁶

Selain diplomasi publik dan diplomasi budaya, salah satu bidang yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dan kreatif adalah kuliner. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara didunia sebagai alat diplomasi. Diplomasi melalui kuliner ini kemudian dikenal sebagai gastro diplomacy.

Diplomasi gastro adalah sebuah sajian berbeda dan menyegarkan dalam praktik diplomasi. Istilah diplomasi gastro diambil dengan menggabungkan kata gastronomi dan juga diplomasi yang berarti penggunaan makanan sebagai media interaksi dalam praktik diplomasi. Serupa seperti diplomasi budaya yang menekankan pada budaya khas dari suatu negara, maka diplomasi gastro juga menekankan pada

⁴⁵ Mengembangkan diplomasi budaya Indonesia dengan mencontoh model negara sahabat diakses melalui <https://kumparan.com/alex-rudini-sulaiman/mengembangkan-diplomasi-budaya-indonesia-dengan-mencontoh-model-negara-sahabat> pada tanggal 9 Agustus 2019

⁴⁶ Meningkatkan branding negara melalui gastrodipomasi diakses melalui <https://setkab.go.id/meningkatkan-branding-negara-melalui-gastro-diplomacy/> pada tanggal 9 agustus 2019

kuliner khas dari suatu negara untuk digunakan sebagai media dalam berdiplomasi.

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengatakan bahwa penggunaan makanan dalam seni berdiplomasi sesungguhnya sudah lama digunakan dalam praktik-praktik diplomasi. Namun, sama seperti diplomasi *soft power* lainnya, diplomasi gastro baru mengalami perkembangan secara pesat dan populer di era globalisasi seperti saat ini.

Di era tahun 2000, beberapa negara telah secara konsisten melakukan diplomasi gastro. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Thailand adalah salah satu negara yang menjadi pelopor pelaksanaan diplomasi gastro. Sejak tahun 2002, pemerintah Thailand melalui program Kitchen of The World, secara aktif melakukan diplomasi gastro. Diplomasi gastro yang dilakukan oleh Thailand memiliki tujuan mendorong lebih banyak orang mengenal dan menikmati makanan khas Thailand serta menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Thailand dan menikmatinya secara langsung.

Dewasa ini, beberapa makanan khas Thailand, seperti Tom Yam hingga Mango Sticky Rice menjadi makanan yang cukup populer di beberapa negara Asia. Selain Thailand, Korea Selatan juga menerapkan diplomasi gastro yang mereka sebut juga sebagai Diplomasi Kimchi. Diplomasi gastro Korea Selatan dilakukan dengan tujuan yang sama dengan diplomasi gastro yang dilakukan oleh Thailand yakni untuk mempopulerkan makanan khas Korea Selatan kepada dunia internasional serta menarik wisatawan untuk berkunjung ke Korea Selatan.

Diplomasi Kimchi dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan tidak hanya dengan menyajikan Kimchi kepada pemerintah negara sahabat yang datang berkunjung ke Korea Selatan tetapi juga melalui budaya populer mereka yakni K-pop dan K-drama. Melalui Kdrama, berbagai makanan khas Korea Selatan diperkenalkan kepada masyarakat internasional yang menjadi penikmat setia K-drama, begitu pula dengan idol K-pop yang turut menjadi duta bagi negaranya untuk mempopulerkan makanan khas asal negeri gingseng tersebut.

Lalu bagaimana dengan diplomasi gastro Indonesia ? Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan ragam kuliner khas. Namun beragamnya kuliner khas Indonesia, nyatanya apabila dibandingkan dengan beberapa negara sahabat seperti Thailand dan Korea Selatan, Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal. Dari puluhan bahkan mungkin ratusan kuliner khas di Indonesia, hanya ada tiga kuliner khas Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat internasional yakni sate, nasi goreng dan juga rendang.

Hal ini turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang pada tahun 2017 pernah menyatakan bahwa diplomasi gastro Indonesia belum cukup kuat apabila dibandingkan oleh negara tetangga⁴⁷. Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya guna memperkuat diplomasi gastro, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menjamu tamu-tamu negara dengan makanan khas Indonesia dan memperkenalkan kuliner khas Indonesia selain tiga kuliner yang paling populer dari Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

⁴⁷ ibid

Selain itu, para Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat juga mengemban misi untuk melakukan diplomasi gastro dan mempopulerkan makanan khas asal Indonesia. Sebagai salah satu contoh praktis, pada Januari 2012, Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Adiyatwidi Adiwoso Asmady melancarkan *gastro diplomacy* dengan mengundang para duta besar untuk mencicipi kuliner Indonesia yang disajikan di Hotel Intercontinental, Madrid Spanyol, dengan maksud untuk lebih memperkenalkan Indonesia khususnya dari sisi kuliner kepada masyarakat di Spanyol⁴⁸.

Serupa seperti diplomasi budaya, diplomasi gastro dilakukan oleh negara bukan hanya sekedar untuk mempopulerkan kuliner khas negara tersebut tetapi juga untuk meraih keuntungan secara ekonomi. Apabila, masyarakat internasional telah banyak mengenal makanan khas dari suatu negara, mereka tentu akan tertarik untuk berkunjung ke negara tersebut dan mencicipi makanan khas negara tersebut langsung dinegara asalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila diplomasi gastro berjalan secara efektif, maka pendapat negara melalui pariwisata akan turut terpengaruh.

Keberhasilan diplomasi gastro Korea Selatan, membuat masyarakat internasional yang selama ini mengenal kuliner khas negeri gingseng tersebut melalui K-drama ataupun K-pop tertarik untuk datang langsung ke Korea Selatan dan mencicipi secara langsung kuliner khas negara tersebut. inilah yang kemudian menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan diplomasi gastro yakni untuk meningkatkan kunjungan wisatawan internasional kenegaranya.

⁴⁸ ibid

Simpulan

Dewasa ini, kecenderungan pola hubungan internasional tidak lagi terfokus hanya pada pola hubungan *government to government* tetapi juga terdapat pola hubungan *government to people* hingga *people to people*. Pola hubungan seperti ini, berdampak pula pada instrumen diplomasi, dimana instrumen diplomasi *soft power* dianggap lebih efisien untuk digunakan oleh negara-negara didunia dalam mencapai kepentingan nasional. Sehingga dewasa ini, negara-negara didunia tidak melulu menerapkan praktik diplomasi *hard power* tetapi juga bisa menerapkan praktik diplomasi publik, diplomasi budaya hingga gastro diplomasi. Terdapat beberapa keuntungan dalam menerapkan diplomasi *soft power* yang tidak dimiliki oleh diplomasi *hard power*, selain itu diplomasi *soft power* juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode guna menurunkan ketegangan antar negara serta meraih kepentingan nasional suatu negara.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Berikan satu contoh pelaksanaan diplomasi publik !
- 1.2 Berikan analisa kritis Anda terkait pelaksanaan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia !
- 1.3 Berikan analisa kritis Anda terkait pelaksanaan diplomasi gastro yang dilakukan oleh Indonesia !

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi publik, diplomasi budaya dan juga diplomasi gastro. Fasilitator akan memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

Jan Mellisen, 2005, *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations*, Palgrave MacMillan, New York

Mark Leonard, 2002 *Public Diplomacy*, The Foreign Policy Centre, London

Van Kim Hoang Ha. *Peran Diplomasi Budaya dalam Mewujudkan Komunitas Sosial Budaya ASEAN: Studi Kasus Vietnam*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. X No. 1. 2016

Yulius Purwadi Hermawan dan Ratih Indraswari. *Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara*. Universitas Katolik Parahyangan. 2014

Diplomasi Budaya ala Tantowi Yahya diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4295452/diplomasi-budaya-ala-tantowi-yahya>

Diplomasi Publik Indonesia diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.org/>

Meningkatkan branding negara melalui gastrodiplomasi diakses melalui <https://setkab.go.id/meningkatkan-branding-negara-melalui-gastro-diplomacy/>

Mengembangkan diplomasi budaya Indonesia dengan mencontoh model negara sahabat diakses melalui <https://kumparan.com/alex-rudini-sulaiman/mengembangkan-diplomasi-budaya-indonesia-dengan-mencontoh-model-negara-sahabat>

Public Diplomacy diakses melalui www.uscpublicdiplomacy.org

Pengertian Propaganda diakses melalui <https://kbbi.web.id/propaganda>

BAB 6

ENVIRONMENT DIPLOMACY AND HUMANITARIAN DIPLOMACY

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan tentang berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan serta mampu menganalisa berbagai contoh kasus praktik diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan.

2. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan awal tentang Hubungan Internasional dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan serta menganalisa berbagai contoh kasusnya.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi lingkungan dan juga diplomasi kemanusiaan, mahasiswa juga akan diberikan pemahaman pentingnya praktik diplomasi lingkungan di era globalisasi serta perbedaan antara diplomasi kemanusiaan

dengan intervensi kemanusiaan beserta contoh kasusnya sehingga akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya yakni *multi track diplomacy*.

4. Manfaat Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa akan mampu mengetahui dan menganalisa berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui pentingnya penerapan diplomasi lingkungan di era globalisasi dan ditengah-tengah ancaman pemanasan global selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisa perbedaan antara diplomasi kemanusiaan dan juga intervensi kemanusiaan.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut diatas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

Dalam bab sebelumnya, telah disampaikan bahwa perkembangan di era globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan hubungan internasional. Hubungan internasional saat ini, tidak hanya berfokus pada isu-isu seperti isu keamanan, isu politik dan juga ekonomi tetapi isu

sosial budaya, isu lingkungan dan juga isu kemanusiaan kini menjadi fokus perhatian dalam hubungan internasional.

Selain isu yang semakin berkembang, aktor dalam hubungan internasional pun semakin berkembang. Perkembangan isu dan juga aktor dalam hubungan internasional, tentunya turut mempengaruhi praktik diplomasi. Praktik diplomasi kini, tidak lagi menekankan kepada praktik *hard power diplomacy* tetapi lebih menekankan kepada praktik *soft power diplomacy*.

Dalam beberapa bab sebelumnya, telah dibahas berbagai contoh praktik *soft power diplomacy*, mulai Diplomasi Panda, *K-pop Diplomacy*, diplomasi publik yang dilakukan Jepang melalui program *Cool Japan*, diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia hingga diplomasi gastro yang dilakukan oleh Thailand melalui program *Kitchen of the World*.

Pada bab ini, bahasan terkait *soft power diplomacy* akan dilanjutkan dengan membahas instrumen *soft power diplomacy* lainnya yakni diplomasi lingkungan dan juga diplomasi kemanusiaan. Kedua instrumen *soft power diplomacy* ini merupakan instrumen yang berfokus pada *humanity* atau kemanusiaan.

Apabila diplomasi kemanusiaan berfokus pada memanusiaikan manusia maka diplomasi lingkungan tidak hanya sekedar berbicara mengenai isu lingkungan akan tetapi juga mengenai masa depan lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal bagi generasi selanjutnya. Hal ini menjadi krusial karena ketika lingkungan ini hancur maka dampak negatifnya juga akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Diplomasi kemanusiaan sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru namun memasuki abad ke-20, praktik diplomasi kemanusiaan menjadi semakin populer. Praktik diplomasi kemanusiaan dapat ditemukan dalam kondisi bencana alam ataupun dalam kondisi konflik. Dalam kondisi konflik, diplomasi kemanusiaan dianggap jauh lebih efisien untuk dilakukan dibandingkan intervensi kemanusiaan.

Namun, sebelum membahas lebih dalam tentang diplomasi kemanusiaan dan perbedaannya dengan intervensi kemanusiaan beserta contoh kasusnya, terlebih dahulu mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang diplomasi lingkungan, yang dimulai dari sejarah singkat diplomasi lingkungan hingga pentingnya penerapan diplomasi lingkungan ditengah ancaman pemanasan global.

1. Diplomasi Lingkungan (*Environmental Diplomacy*)

Sebagai mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, mendengar kata *global warming* atau *climate change* tentu bukanlah sesuatu yang asing. Memasuki tahun 2000, isu perubahan iklim dan juga pemanasan global menjadi salah satu isu yang menarik banyak perhatian masyarakat internasional. Hingga akhirnya negara-negara didunia melakukan pertemuan guna membahas isu tersebut dan istilah diplomasi lingkungan pun menjadi populer.

Namun pada kenyataannya, diplomasi lingkungan bukanlah sesuatu yang baru dalam hubungan internasional. Diplomasi lingkungan pertama kali menjadi topik pembicaraan dalam praktik diplomasi pada saat Perang Dingin. Hal ini dipengaruhi dengan semakin maraknya

eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan serta berbagai masalah lingkungan lainnya yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai aktor Hubungan Internasional akan implikasi kerusakan lingkungan tersebut dalam skala global.

Eksploitasi terhadap lingkungan marak dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Negara melakukan eksploitasi terhadap lingkungan guna mengambil dan mengelola sumber daya alam. Namun dalam prosesnya negara kerap kali lalai dalam memperhatikan dampak yang ditimbulkan sehingga berbagai masalah lingkungan pun mulai bermunculan dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kekhawatiran ini pulalah yang mendasari lahirnya Politik Hijau atau *Green Politic* hingga kemudian terbentuknya Partai Hijau atau *Green Party* di beberapa negara salah satunya adalah Australia.

Kekhawatiran akan implikasi kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat internasional, tidak hanya berdampak pada lahirnya politik hijau ataupun partai hijau di beberapa negara tetapi juga melahirkan praktik diplomasi yang membahas tentang isu lingkungan. *United Nation Conference on the Human Environment* yang diadakan di Stockholm tahun 1972, hadir sebagai respon awal terhadap permasalahan lingkungan yang menerpa dunia internasional.

Konferensi ini menghasilkan beberapa agenda *action plan* serta *Declaration of Principles* yang disetujui oleh berbagai negara. Namun, dikarenakan implementasi dari konferensi tersebut kurang bisa dirasakan manfaatnya dalam

perbaikan lingkungan, 20 tahun kemudian diadakanlah *Earth Summit Committee* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 sebagai kelanjutan dari Konferensi Stockholm yang telah diadakan sebelumnya⁴⁹.

Meskipun bahasan isu lingkungan telah menjadi kekhawatiran negara-negara didunia dan telah menjadi salah satu agenda dalam praktik diplomasi namun *Rio Earth Summit* yang kemudian hadir sebagai *turning point* atau titik balik lahirnya *environmental diplomacy* atau diplomasi lingkungan. Tercatat hampir 180 negara berpartisipasi dalam *Rio Earth Summit*, terdapat 118 kepala negara dan juga aktor-aktor lainnya seperti IGO dan INGO. Semenjak pertemuan *Rio Earth Summit*, urusan luar negeri dan dalam negeri suatu negara tidak dapat lagi dipisahkan dengan isu-isu lingkungan sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara harus memikirkan aspek lingkungan.

Diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk membantu pihak yang berkonflik dalam meresolusi konflik yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan ataupun sumber daya alam. Definisi yang tidak terlalu jauh berbeda, diutarakan oleh Borg yang mengatakan bahwa diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam menangani persoalan-persoalan

⁴⁹ Mrema, Elizabeth dan Sylvia Bankobeza. *International Environmental Diplomacy and Negotiations*. Terdapat dalam Amalia Mastur. Artikel Environment Diplomacy. Diakses melalui <http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id> pada tanggal 15 agustus 2019

lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional⁵⁰.

Dari definisi Borg tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam skala global atau internasional, membutuhkan penanganan bersama salah satunya melalui praktik diplomasi. Lebih lanjut, Borg mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam praktik diplomasi lingkungan, antara lain⁵¹ :

- a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai dasar serta petunjuk dalam praktik diplomasi lingkungan
- b. Status dari prinsip hukum lingkungan internasional
- c. Menekankan pada tindakan preventif dalam mencapai konsensus diantara negara-negara
- d. Saling berbagi informasi dan konsultasi diantara negara-negara
- e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang
- f. Keputusan pengadilan internasional dapat melibatkan agen diplomatik
- g. Berbagai resolusi PBB serta deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional akan mempengaruhi politik luar negeri suatu negara
- h. Keputusan UNEP yang meletakkan berbagai prinsip dan petunjuk yang dapat mempengaruhi praktik dan tujuan diplomasi lingkungan

⁵⁰ Andreas Pramudianto, S.H M.Si. 2008. *Diplomasi Lingkungan : Teori dan Fakta*. Jakarta. UI Press. Hlm. 26

⁵¹ Ibid. Hlm. 35-38

- i. Laporan-laporan dari Komisi Hukum Internasional yang berpengaruh besar terhadap persoalan lingkungan
- j. Pendapat umum serta tekanan-tekanan dari NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional

Bahasan mengenai isu lingkungan dalam praktik diplomasi, tidak berhenti pada *Rio Earth Summit* saja. Memasuki dekade tahun 2000, isu lingkungan semakin marak menjadi perbincangan, hal ini terkait dengan *climate change* dan *global warming*. Kondisi perubahan iklim dan juga pemanasan global membuat aktor-aktor INGO seperti Green Peace semakin kencang bersuara meneriakan urgensi para pemimpin negara untuk segera mengambil tindakan.

Tidak dapat dipungkiri, isu lingkungan hidup kini telah menjadi isu perpolitikan global. Hal ini tidak terlepas dari persoalan lingkungan hidup yang turut berpengaruh pada sistem politik internasional. Adapun tujuan dari diplomasi lingkungan adalah untuk mengurangi implikasi dari persoalan-persoalan lingkungan terhadap sistem politik internasional.

Di tahun 2005, sejumlah negara-negara didunia menyepakati Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan persetujuan dalam kerangka kerja PBB mengenai isu perubahan iklim dan pemanasan global, beberapa negara berkomitmen mengurangi gas karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lain, guna meredam dan mengurangi gejala pemanasan global. Target jangka panjang dari Protokol Kyoto sendiri adalah untuk menurunkan kenaikan suhu global antara 0,02 derajat celcius dan 0,28 derajat celcius

hingga 2050. Sejak diberlakukan pada tanggal 16 Februari 2005, sudah terdapat 172 negara yang berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.

Namun efektifkah Protokol Kyoto sebagai upaya mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim ? Ada banyak penelitian dan juga karya ilmiah yang telah dibuat oleh para akademisi Hubungan Internasional sehubungan dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global termasuk pula terkait efektivitas dari Protokol Kyoto itu sendiri. Dari karya ilmiah serta penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan negara-negara didunia melalui Protokol Kyoto nyatanya belum cukup untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah komitmen dari negara-negara industri maju, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa isu perubahan iklim dan pemanasan global adalah bohong atau *hoax*. Presiden Donald Trump pun menunjukkan keseriusan pendapatnya terkait perubahan iklim dengan menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim yang sebelumnya telah disepakati dalam KTT Perubahan Iklim di Paris pada tahun 2015.

Sikap serta kebijakan yang diambil Amerika Serikat sendiri sesungguhnya bukan karena sang presiden tidak percaya bahwa pemanasan global itu benar terjadi tetapi lebih berkenaan dengan alasan ekonomi. Secara sederhana, implementasi perjanjian iklim guna mencapai target tingkat emisi gas rumah kaca di Amerika akan berdampak negatif terhadap perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Menurut National Economic Research Associates (NERA), usaha

mencapai target dalam perjanjian iklim akan berakibat pada hilangnya 2,7 juta lapangan kerja pada tahun 2025, berkurangnya GDP sebanyak USD 3 Triliun pada tahun 2040, dan berkurangnya pendapatan rumah tangga sebanyak USD 7.000 per tahun pada tahun 2040⁵². Amerika pun memilih untuk menarik diri dari perjanjian iklim dibandingkan harus mengorbankan perekonomian negaranya. Inilah yang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam setiap pembahasan isu lingkungan diantara negara-negara didunia.

Kondisi dilematis seperti yang dihadapi oleh Amerika Serikat tentunya menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Bagaimana sebuah negara dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, apakah ingin menunjukkan komitmen terhadap isu perubahan iklim namun mengorbankan perekonomian negaranya atau memilih untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dengan resiko mendapatkan kritikan dari masyarakat internasional terkait komitmen terhadap isu perubahan iklim ?

Mengatasi persoalan-persoalan lingkungan, sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Apa yang menjadi tantangan oleh Amerika Serikat, juga dirasakan oleh negara-negara industri maju lainnya seperti Australia yang sempat kewalahan mencapai target emisi yang telah ditetapkan oleh Protokol Kyoto.

⁵² “Perjanjian Iklim Paris bagi Amerika Serikat di era Trump, Masalah iklim atau ekonomi” diakses melalui <https://kumparan.com/jonathan-go/perjanjian-iklim-paris-bagi-amerika-serikat-di-era-trump-masalah-iklim-atau-ekonomi> pada tanggal 9 agustus 2019

Lalu bagaimana dengan negara-negara berkembang ? Serupa dengan negara industri maju, negara berkembang juga menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dengan meratifikasi Protokol Kyoto ataupun Perjanjian Iklim di Paris namun pada akhirnya, bagaimana komitmen tersebut dijalankan hanya akan dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh negara tersebut di level nasional sebagai tindak lanjut dari perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah disepakati dan diratifikasi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menunjukkan komitmennya terhadap persoalan perubahan iklim sejak tahun 2009, ketika Indonesia mengumumkan komitmen untuk menurunkan emisi secara sukarela sebesar 26% pada tahun 2020. Pada tahun 2015, Indonesia telah menyampaikan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29%. INDC Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan alih guna lahan serta kehutanan juga limbah⁵³.

Meskipun berbagai upaya dan kesepakatan telah dicapai oleh negara-negara didunia guna mengatasi persoalan-persoalan lingkungan namun persoalan lingkungan tetap menjadi salah satu isu yang penting dan dianggap dapat mengancam kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, diplomasi lingkungan yang dapat dilakukan tidak hanya oleh aktor negara tetap juga oleh aktor non negara, memegang

⁵³ Komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/96/halaman_list_lainnya/perubahan-iklim pada tanggal 10 agustus 2019

peranan kunci dalam mendorong para pemangku kebijakan untuk mempertahankan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan tersebut.

2. Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)

Hubungan antara negara-negara didunia, tidak selalu terjalin dengan baik melalui kerjasama, tidak jarang terjadi friksi dan konflik yang bahkan dapat berujung pada perang diantara negara-negara didunia. Konflik dan perang dalam hubungan internasional adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, namun meskipun tidak dapat dihindari, negara-negara didunia tetap berupaya untuk mencegah agar konflik dan perang tidak merusak harmonisasi perdamaian dunia. Guna menjaga harmonisasi perdamaian dunia tersebut, aktor negara beserta aktor non negara seperti ICRC bertemu di Swiss dalam sebuah konvensi yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa, konvensi inilah yang mendasari lahirnya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Hukum Humaniter Internasional atau yang lebih dikenal juga sebagai Hukum Perang merupakan aturan main ketika konflik dan perang terjadi dalam hubungan internasional. Dapat juga dikatakan sebagai suatu aturan yang dibuat guna mengatur interaksi antar negara dalam kondisi perang. Mengapa perang memerlukan aturan main ? Hal ini tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh perang itu sendiri. Ketika negara berkonflik ataupun berperang, dampak yang diakibatkan antara lain kerusakan bangunan, kerugian secara ekonomi hingga korban jiwa baik yang terluka maupun yang tewas. Sehingga secara

sederhana, HHI dibuat guna mengurangi dampak dari perang itu sendiri dan juga guna melindungi masyarakat sipil.

Selain HHI, perangkat lainnya yang digunakan untuk mengurangi dampak dari perang dan melindungi masyarakat sipil adalah diplomasi kemanusiaan atau *humanitarian diplomacy*. Dalam bab 2 buku ajar ini, telah disampaikan bagaimana proses negosiasi antar negara-negara harus mengutamakan kepentingan bersama dibanding *power* ataupun *bargaining positions*. Dalam kondisi konflik, hal ini terkadang cukup sulit untuk dilakukan sehingga diplomasi kemanusiaan hadir sebagai produk dari proses negosiasi tradisional. Diplomasi ini mengedepankan kepentingan bersama dan juga kepentingan masyarakat yang menjadi korban konflik dengan berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Serupa dengan hukum humaniter internasional, diplomasi kemanusiaan memiliki tujuan untuk memanusiaikan manusia. Tujuan utama diplomasi kemanusiaan adalah untuk melindungi masyarakat sipil yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi konflik, masyarakat sipil yang kerap menjadi korban baik korban luka ataupun tewas hingga menjadi korban kekerasan seksual dan juga terpaksa dijadikan kombatan dalam perang.

Diplomasi kemanusiaan hadir guna mengurangi kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sipil sebagai dampak dari konflik ataupun perang. Karena tujuannya adalah untuk memanusiaikan manusia, maka praktik diplomasi kemanusiaan tidak terbatas pada situasi konflik dan perang saja namun juga dapat dipraktikkan dalam kondisi bencana alam.

Dalam kondisi bencana alam, masyarakat sipil sudah pasti akan menjadi korban, baik korban luka maupun korban tewas. Tidak jarang, mereka harus mengungsi sementara ditempat pengungsian karena tempat tinggal mereka hancur. Bencana alam juga kerap kali memberikan dampak berupa kerugian secara materil bagi masyarakat sipil. Dalam kondisi seperti ini, para korban bencana tersebut sama rentannya dengan para korban konflik sehingga para korban bencana juga membutuhkan bantuan yang layak, tidak hanya dari pemerintah negaranya tetapi juga dari masyarakat internasional. Dalam kondisi seperti inilah diplomasi kemanusiaan dapat diterapkan.

Meskipun konsep humanitarianisme atau konsep kemanusiaan telah diperkenalkan lebih dari satu abad yang lalu, diplomasi kemanusiaan sendiri mulai populer setelah era Perang Dingin berakhir. Ditandai dengan semakin banyaknya organisasi kemanusiaan yang mendedikasikan diri kepada para korban konflik maupun bencana alam. Sebelum era Perang Dingin, organisasi kemanusiaan yang aktif membantu para korban konflik dan bencana alam diseluruh dunia hanyalah ICRC.

Dalam diplomasi kemanusiaan, aktor yang dapat melakukan praktiknya tidak hanya terbatas pada aktor negara tetapi juga aktor non negara seperti NGO hingga *private individu*. Hanya karena praktik ini bernama diplomasi kemanusiaan bukan berarti hanya seorang diplomat yang dapat menjalankannya. Selain itu, hanya karena praktik ini bernama diplomasi kemanusiaan, janganlah dibayangkan bahwa praktik yang dilakukan berupa perundingan layaknya proses negosiasi diplomasi konvensional.

Diplomasi kemanusiaan memiliki bentuk penerapan yang berbeda dengan diplomasi konvensional. Diplomasi kemanusiaan dilakukan melalui aktivitas nyata yang secara langsung berdampak kepada masyarakat sipil di suatu negara yang membutuhkan pertolongan meskipun pada level negara. Aktor negara bisa juga melakukan aktivitas diplomasi kemanusiaan dengan melakukan pertemuan bilateral ataupun multilateral.

Dalam praktiknya, aktor yang melakukan diplomasi kemanusiaan utamanya dalam kondisi konflik, haruslah setia pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan ini menjadi suatu hal yang penting dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaan. Adapun prinsip-prinsip kemanusiaan yang dimaksud, antara lain⁵⁴ :

Prinsip pertama, aktor yang melakukan diplomasi kemanusiaan haruslah imparial, imparial berarti aktor tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dan konflik ataupun perang.

Prinsip kedua, aktor yang melakukan diplomasi kemanusiaan haruslah netral, netral berarti aktor tersebut tidak memiliki kepentingan. Ketika seorang aktor memiliki kepentingan dalam suatu konflik, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatannya dalam proses resolusi konflik tersebut lebih kental unsur politis dibandingkan unsur kemanusiaan. Idealnya, seorang aktor yang menjalankan diplomasi kemanusiaan hendaklah bertindak demi memanusiaikan

⁵⁴ Hazel Smith. 2007. *Humanitarian Diplomacy : Practitioners and Their Craft* edited by Larry Minear and Hazel Smith. United Nation University Press. New York. Hlm. 36

manusia yang menjadi korban dari konflik, bukan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

Prinsip ketiga atau terakhir adalah independen yakni aktor yang mempraktikkan diplomasi kemanusiaan harus berkomitmen untuk tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan.

Banyak pihak yang mengira bahwa diplomasi kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan adalah dua hal yang sama. Diplomasi kemanusiaan dan juga intervensi kemanusiaan dianggap sebagai upaya penyatuan antara politik dan juga kemanusiaan akan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara diplomasi kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan.

Perbedaan pertama antara diplomasi kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan adalah prinsip terakhir dalam prinsip kemanusiaan yakni independen. Dalam diplomasi kemanusiaan aktornya haruslah independen agar tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak lainnya. Sementara dalam intervensi kemanusiaan, intervensi dari pihak-pihak lain dalam pelaksanaannya terkadang menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Perbedaan kedua antara diplomasi kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan terletak pada aktor yang berperan didalamnya. Dalam diplomasi kemanusiaan, aktor yang berperan didalamnya bisa aktor negara, bisa pula aktor non negara sementara dalam intervensi kemanusiaan, aktor yang berperan hanyalah aktor negara saja.

Perbedaan ketiga atau terakhir antara diplomasi kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan adalah terkait cara pelaksanaannya. Diplomasi kemanusiaan dijalankan dengan cara-cara damai sementara intervensi kemanusiaan dijalankan dengan menggunakan kekuatan militer.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa dalam diplomasi kemanusiaan, unsur kemanusiaan menjadi sesuatu hal yang diutamakan dan dijunjung tinggi dibandingkan unsur politis, hal ini terlihat dari cara-cara damai yang dilakukan guna melindungi masyarakat sipil. Sementara dalam intervensi kemanusiaan, unsur politislah yang jauh lebih diutamakan dibandingkan unsur kemanusiaan, hal ini terlihat dari penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaannya sehingga tidak jarang hal ini justru berujung pada kondisi atau situasi yang jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

Salah satu contoh intervensi kemanusiaan adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis yang disebut sebagai operasi Odyssey Dawn pada bulan Maret 2011. Operasi ini dilakukan untuk memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan resolusi 1973.

Resolusi 1973 sendiri berisi tentang perlindungan warga sipil di Libya dan *No Fly Zone* di wilayah Libya. *No Fly Zone* ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Muammar Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara. Setelah lima hari dijalankannya operasi Odyssey Dawn,

intervensi kemanusiaan di Libya diambil alih oleh NATO melalui operation unified protection⁵⁵.

Intervensi kemanusiaan dilakukan ketika pemerintah suatu negara telah menggunakan kekuatan militer terhadap rakyatnya sendiri atau ketika hukum disuatu negara sudah tidak lagi berlaku. Berbicara tentang intervensi kemanusiaan maka tidak akan terlepas dari pro dan kontra. Dalam hubungan internasional, intervensi adalah suatu tindakan yang dianggap melanggar norma dan hukum internasional karena negara secara paksa memasuki dan melanggar kedaulatan suatu negara. Namun intervensi kemanusiaan memiliki pengertian yang berbeda dengan intervensi militer.

Intervensi kemanusiaan mengatasnamakan kemanusiaan dalam menjalankan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer sehingga meskipun tujuannya baik, intervensi kemanusiaan bukannya tanpa resiko karena penggunaan kekuatan militer yang dilakukan juga dapat menjadikan rakyat sipil yang ingin dilindungi justru malah menjadi korban.

Apabila intervensi kemanusiaan memiliki risiko memperburuk situasi atau kondisi karena penggunaan kekuatan militer maka dengan kata lain, bukankah lebih baik bagi negara-negara untuk mengedepankan praktik diplomasi kemanusiaan dan meninggalkan praktik intervensi kemanusiaan. Namun nyatanya, masih banyak negara-negara yang tetap mempraktikkan intervensi kemanusiaan terlepas dari risiko yang membayangnya. Hal ini tidak terlepas dari

⁵⁵ Jerry Indrawan. "Legalitas dan Motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya". *Jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 4, No. 2, 2013. Hlm. 127-149

prinsip *Responsibility to Protect* atau R2P yang menjadi norma dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan.

Salah satu perkembangan penting dalam konsep humanitarianisme adalah kemunculan konsep '*Responsibility to Protect*' atau R2P, sebagai manifestasi dari komitmen etis negara. R2P dapat dianggap sebagai institusionalisasi prinsip humanitarianisme. Konsep ini muncul pada tahun 2006 pasca pertemuan tingkat tinggi PBB yang ke-60 pada tahun 2005.

Prinsip dasar R2P adalah bahwa kedaulatan mengimplikasikan tanggung jawab (*sovereignty is responsibility*) untuk melindungi warga masyarakat dari kekerasan terhadap kemanusiaan di suatu wilayah negara. Di mana pun warga mengalami penderitaan yang diakibatkan gagalannya negara melindungi warga negaranya maka perlindungan terhadap warga negara tersebut menjadi tanggung jawab internasional. R2P menjadi basis legitimasi bagi tindakan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*), suatu tindakan yang diambil komunitas internasional untuk melindungi warga sipil di suatu negara dengan menggunakan sarana militer.

Secara sederhana, prinsip R2P dan juga intervensi kemanusiaan sesungguhnya ingin mendobrak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa negara selalu bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dengan adanya prinsip R2P dan juga intervensi kemanusiaan, negara ingin menghapus stigma bahwa mereka adalah aktor yang egois, bahwa negara juga bisa mengesampingkan faktor politis demi faktor kemanusiaan.

Namun pertanyaan selanjutnya, apabila R2P dan intervensi kemanusiaan benar-benar dilakukan atas dasar kemanusiaan, lalu bagaimana dengan masyarakat sipil yang terkadang turut menjadi korban ketika intervensi kemanusiaan itu dilakukan ? Bagaimana dengan warga Rohingya ? Mengapa mereka tidak mendapatkan intervensi kemanusiaan ? Padahal ada begitu banyak warga Rohingya yang dibantai oleh militer di Myanmar. Pro kontra terkait intervensi kemanusiaan pun masih menjadi diskusi yang menarik dalam hubungan internasional, apakah intervensi kemanusiaan dilakukan murni atas alasan kemanusiaan atautkah ada alasan politis yang menyertainya.

Diplomasi kemanusiaan disisi lain memiliki perbedaan dengan intervensi kemanusiaan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa diplomasi kemanusiaan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan mengesampingkan nilai-nilai politis sehingga cara-cara yang digunakannya pun adalah cara-cara damai.

Salah satu contoh diplomasi kemanusiaan adalah yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi etnis Rohingya di Myanmar. Pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya, pemerintah Indonesia juga membangun infrastruktur di wilayah Rakhine. Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan kepada pemerintah Myanmar agar pemerintah Myanmar lebih memberikan perhatian kepada para korban konflik.

Selain dalam konflik Rohingya, pemerintah Indonesia juga aktif melakukan diplomasi kemanusiaan dalam konflik Israel dan Palestina. Serupa dengan diplomasi kemanusiaan

di Rohingya, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan infrastruktur kepada masyarakat Palestina. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menyuarakan hak-hak warga Palestina dan mendorong masyarakat internasional untuk melakukan upaya agar terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Komitmen diplomasi kemanusiaan Indonesia bagi Palestina, dipertegas melalui perdamaian Israel dan Palestina yang menjadi salah satu fokus agenda kerja Indonesia sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB diawal tahun 2019.

Jangan lupakan bahwa diplomasi kemanusiaan, tidak hanya dapat dilakukan dalam kondisi konflik tetapi juga dalam kondisi bencana alam. Dalam kondisi bencana alam, diplomasi kemanusiaan jauh lebih mudah untuk ditemukan yakni melalui pemberian bantuan kemanusiaan bagi korban bencana itu sendiri.

Pemberian bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam dapat dibedakan menjadi bantuan jangka pendek dan juga bantuan jangka panjang. Bantuan jangka pendek adalah bantuan yang diberikan ketika bencana alam baru saja terjadi atau dalam konsep *natural disaster management*, hal ini disebut sebagai *response*. Bantuan jangka pendek ini bisa berupa bantuan makanan, pakaian hingga obat-obatan yang menjadi kebutuhan dasar para korban bencana.

Sementara bantuan jangka panjang, dilakukan dengan dua sasaran. Sasaran pertama adalah sumber daya manusia sementara sasaran kedua adalah infrastruktur. Ketika bencana alam terjadi, infrastruktur yang berada diwilayah tersebut sedikit banyak akan mengalami kerusakan sehingga

bentuk salah satu bantuan jangka panjang adalah dengan membangun kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan sebagai dampak dari bencana alam. Dalam konsep *natural disaster management*, hal ini disebut sebagai *development*.

Bantuan jangka panjang selanjutnya, dengan sasaran sumber daya manusia, dalam konsep *natural disaster management* disebut sebagai mitigasi yakni sebuah proses pengajaran untuk mempersiapkan warga masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana.

Keberhasilan diplomasi kemanusiaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Inter-Agency Standing Committee (IASC) terdapat empat hal yang menjadi parameter keberhasilan sebuah diplomasi kemanusiaan yakni⁵⁶:

- a. Komitmen pembuat kebijakan dan pemimpin negara untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang rentan dan terkena dampak krisis
- b. Akses kemanusiaan yang lebih luas
- c. Pemahaman yang kuat dalam memobilisasi sumber daya
- d. Fasilitasi terhadap *partnership* bagi masyarakat yang terkena dampak

Dapat disimpulkan bahwa, perbedaan antara diplomasi kemanusiaan dalam kondisi konflik dan dalam kondisi bencana alam adalah dalam kondisi bencana alam,

⁵⁶ Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar diakses melalui <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/riset-iis/diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-myanmar/> pada tanggal 10 agustus 2019

diplomasi kemanusiaan dilakukan hanya dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Sementara dalam kondisi konflik, diplomasi kemanusiaan dilakukan tidak hanya melalui pemberian bantuan kemanusiaan akan tetapi juga dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak terkait secara politis.

Simpulan

Lingkungan dan kemanusiaan adalah dua isu yang banyak menarik perhatian masyarakat internasional. Kedua isu ini dirasa penting karena apabila persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan isu kemanusiaan tidak segera diatasi dengan baik maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Persoalan-persoalan lingkungan tidak hanya banyak melahirkan aktivis-aktivis lingkungan tetapi juga melahirkan politik hijau dan juga diplomasi lingkungan. Dengan adanya praktik diplomasi lingkungan, setiap kebijakan yang dibuat oleh negara, baik kebijakan dalam negeri ataupun luar negeri harus bersinergi dengan komitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan meskipun komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan ini pulalah yang menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara diplomasi kemanusiaan hadir sebagai pendekatan alternatif yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat internasional yang dianggap telah mengalami tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan dilakukan dengan cara-cara damai dan mengedepankan nilai-

nilai humanitarian dibandingkan nilai-nilai politis, hal ini berbeda dengan intervensi kemanusiaan.

Diplomasi adalah sebuah konsep yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Diplomasi soft power adalah salah satu bukti fleksibilitas dari diplomasi itu sendiri yang beradaptasi dengan era globalisasi sehingga lebih memberi ruang kepada diplomasi yang berfokus pada isu-isu sosial budaya, lingkungan hingga kemanusiaan. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan alternatif karena kini diplomasi juga melibatkan peran masyarakat internasional meskipun pengambil kebijakan tetaplah negara.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Jika Anda adalah seorang aktivis lingkungan hidup, diplomasi lingkungan seperti apakah yang akan Anda lakukan guna mendorong komitmen pemerintah negara-negara didunia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan ?
- 1.2 Berikan analisa kritis Anda terkait pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia baik terhadap konflik Rohingya maupun konflik Israel dan Palestina !

2. Umpan Balik

Mahasiswa diharapkan dapat memahami materi terkait dan dapat berpikir kritis serta memberikan pendapatnya terkait berbagai instrumen dalam *soft power diplomacy* yakni diplomasi lingkungan dan diplomasi kemanusiaan. Fasilitator akan memberikan respon terkait tugas mandiri mahasiswa, respon serta tanggapan ini diharapkan mampu menjadi pematik diskusi didalam kelas.

3. Daftar Pustaka

Andreas Pramudianto, S.H M.Si. 2008. *Diplomasi Lingkungan : Teori dan Fakta*. UI Press. Jakarta.

Smith, Hazel. 2007. *Humanitarian Diplomacy : Practioners and Their Craft* edited by Larry Minear and Hazel Smith. United Nation University Press. New York.

Jerry Indrawan. “Legalitas dan Motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya”. *Jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 4, No. 2, 2013. Hlm. 127-149

Mrema, Elizabeth dan Sylvia Bankobeza. *International Environmental Diplomacy and Negotiations*. Terdapat dalam Amalia Mastur. Artikel Environment Diplomacy. Diakses melalui <http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id>

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar diakses melalui <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/riset-iis/diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-myanmar/>

Komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim diakses melalui

https://kemlu.go.id/portal/id/read/96/halaman_list_lainnya/peubahan-iklim

Perjanjian Iklim Paris bagi Amerika Serikat di era Trump, Masalah iklim atau ekonomi” diakses melalui <https://kumparan.com/jonathan-go/perjanjian-iklim-paris-bagi-amerika-serikat-di-era-trump-masalah-iklim-atau-ekonomi>

BIOGRAFI PENULIS



Frisca Alexandra MA lahir pada tanggal 21 Agustus 1991, di Samarinda, Kalimantan Timur. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Samarinda dan melanjutkan pendidikan Strata 1 pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada tahun 2008. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada tahun 2012. Penulis sempat bekerja selama satu tahun yakni dari tahun 2012 hingga 2013 sebagai Conselor di International Development Program (IDP) Australia sebelum akhirnya melanjutkan studi Magister pada tahun 2013 di Universitas GadjahMada dengan jurusan Hubungan Internasional Minat Khusus Global Humanitarian Diplomacy dan berhasil mendapatkan gelar Master of Arts pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan studi magister di Universitas GadjahMada, penulis kembali ke Universitas Mulawarman untuk mengabdikan diri sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional. Terhitung sejak tahun 2014 hingga saat ini, penulis aktif sebagai Dosen Luar Biasa pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman.

Adapun berbagai karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh penulis antara lain “*Upaya Pemerintah Jepang Dalam Perelokasian Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa.*” Terdapat dalam Jurnal Interdependence, Vol 1(2): 150-164. “*Analisis Pecahnya OMIP (Orang Melayu*

Islam Patani) dan Dampaknya Terhadap Konflik Thailand Selatan". Terdapat dalam Jurnal Interdependence, Vol 5(1): 1-10. "Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis." Terdapat dalam Jurnal Paradigma. Vol 6(3): 137-146. "Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi." Terdapat dalam Jurnal Global & Policy, Vol 6(2) : 127-140 dan juga "Pendidikan Perdamaian dan Fenomena Kekerasan Kultural pada Anak dan Remaja di Indonesia." Terdapat dalam Jurnal Paradigma. Vol 7(3) : 105-117.



Dadang Ilham Kurniawan Mujiono, S.Sos.,M.A. lahir pada tanggal 24 November 1989, di Samarinda, Kalimantan Timur. Menempuh Pendidikan SD sampai SMA di Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman sejak tahun 2007 dan lulus pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Mulawarman, penulis sempat menjadi Asisten Dosen Mata Kuliah Diplomasi Teori dan Praktikum selama 2 semester. Kemudian di tahun yang sama pada saat kelulusan Sarjana, penulis melanjutkan Pendidikan *Master of Arts* (M.A.) pada program studi dan fakultas yang sama di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2013. Di tahun yang sama, penulis melamar dan diterima sebagai Dosen Luar Biasa di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan menjadi dosen dengan kualifikasi S2 termuda di Universitas Mulawarman pada usia 23 tahun. Lalu di tahun 2014 mengikuti tes CPNS dan diterima sebagai Dosen Tetap PNS di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan menjadi dosen PNS dengan kualifikasi S2 termuda di Universitas Mulawarman pada usia 24 tahun. Selain bertugas sebagai Dosen, penulis juga bertugas sebagai Sekretaris Pembantu Rektor II pada tahun 2013, dan di tahun 2014 sampai 2018 menjadi Sekretaris Rektor Universitas Mulawarman. Di tahun 2017 – 2018, penulis juga menjadi

Staf Khusus Wakil Rektor II dalam unit kerja Administrasi Umum.

Selain tugas dosen yang tertuang dalam Tridarma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan pertemuan ilmiah baik nasional dan internasional. Tercatat pada tahun 2014 memimpin rombongan delegasi Universitas Mulawarman dalam kunjungan ke wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dan kunjungan ke Konsulat Republik Indonesia di Tawau-Malaysia. Kemudian di tahun 2015, memimpin delegasi Universitas Mulawarman dalam *International Conference on Europeanist* di Paris, France. Di tahun 2016, menjadi sekretaris delegasi Universitas Mulawarman pada *Harvard World Model United Nations Conference* di Rome, Italy. Selibuhnya di tahun berikutnya sampai sekarang penulis juga aktif dalam konferensi internasional dan bertindak sebagai *Presenter Paper* baik di Indonesia dan Luar Negeri.

Di tiga tahun terakhir sampai sekarang, penulis aktif menulis dan penelitian dalam bidang Kerjasama Internasional khususnya pada sektor *Eco-Tourism*, lebih tepatnya pada objek wisata bahari di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

KATA MEREKA



Rahmah Daniah, S.IP., M.Si.

(Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Unmul)
The Art of Diplomacy ...istilah ini sangat familiar untuk para pengkaji diplomasi, untuk itu buku ini berhasil memetakan pembahasan mengenai diplomasi sebagai seni secara dalam dan komprehensif.



Dr (Cand). Sonny Sudiar, M.A.

(Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Unmul)
Buku ini merupakan refleksi dari kegigihan dan keuletan kedua penulisnya untuk menghadirkan materi bacaan berkualitas tentang diplomasi.



**Mulawarman
University PRESS**

Member of IKAPI & APPTI

Penerbit
Mulawarman University PRESS
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id

ISBN 978-623-7480-14-3

